



PERUBAHAN RENCANA KERJA (P.RENJA) TAHUN 2023

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini dapat disusun. P.Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ini selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam perencanaan, prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan, serta pelaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

Sesuai dengan amanah yang termaktub dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah menyusun Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, P.Renja ini merupakan dokumen untuk memenuhi maksud dari Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas dan juga sebagai pemenuhan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, yang dalam penyusunannya memerhatikan keselarasan dengan program prioritas nasional tahun 2023, prioritas daerah, serta analisis terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun berjalan.

Kami sangat mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dan membantu penyusunan P.Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini. Semoga seluruh daya dan upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat, hidayah, dan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, Juli 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara,



dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19651119 199903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.....	8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4 Review Terhadap RKPD	27
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB V PENUTUP.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 Keadaan Triwulan II
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023 Keadaan Triwulan II
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2023 Keadaan Triwulan II
Tabel 2.4	Pergeseran/Perubahan Anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 per Program
Tabel 2.5	Pergeseran/Perubahan Anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 per Jenis Belanja
Tabel 2.6	Jumlah Alokasi, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran per Jenis Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Keadaan 30 Juni 2023
Tabel 2.7	Jumlah Alokasi, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran per Program APBD Tahun Anggaran 2023 Keadaan 30 Juni 2023
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2023
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2023
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2023
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman Tahun 2023
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2023
Tabel 3.1	Rekapitulasi Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Tren Peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Sumatera Utara Tahun
2013 – 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu dilaksanakan pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pemenuhan hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan menuju masyarakat mandiri untuk hidup sehat.

Berbagai upaya pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan mendapatkan tantangan, baik secara lokal, nasional, maupun global, sebagai akibat dari perubahan sosial ekonomi serta perubahan lingkungan strategis. Berbagai masalah dan tantangan dalam pembangunan kesehatan telah berkembang semakin berat dan kompleks dan kadang-kadang tidak terduga. Semakin dirasakan bahwa pembangunan kesehatan tidak dapat mencapai tujuannya bila hanya diselenggarakan oleh sektor kesehatan saja. Keikutsertaan pihak lain (*stakeholders*) secara lintas sektor termasuk swasta dan masyarakat serta seluruh potensi bangsa sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P.Renja PD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2019–2023 dan perubahannya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2019–2023 dan perubahannya, serta memperhatikan arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dalam rangka memenuhi tanggung jawab penyediaan fasilitas pelayanan

kesehatan sesuai dengan tuntutan UUD 1945 pasal 34 dan pencapaian sasaran pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.

P.Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah dokumen rencana 1 (satu) tahun. Penyusunan dokumen P.Renja PD adalah amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2)), yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

P.Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 memuat rancangan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perubahan Renja PD ini dirumuskan dengan melakukan telaahan terhadap kebijakan kesehatan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024.

1.2 Landasan Hukum

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435);
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

- 13 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 17 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1447);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 21 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;

- 22 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
- 23 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 6);
- 24 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
- 25 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
- 26 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
- 27 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9);
- 28 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- 29 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan P.Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dimaksudkan untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan arah pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, serta menjadi dasar bagi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023.

b. Tujuan

1. Tersusunnya rencana program/kegiatan/sub kegiatan prioritas pembangunan Kesehatan Sumatera Utara Tahun 2023 yang selaras dengan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023.
2. Terwujudnya program dan kegiatan pembangunan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat urgensinya.
3. Terwujudnya pola perencanaan yang konsisten, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi hasil program/kegiatan/sub kegiatan.
4. Terselenggaranya pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan kesehatan Tahun 2023 secara terarah dan terukur dengan menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

P.Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) Bab, di mana masing-masing Bab memuat beberapa Subbab sebagai berikut:

Bab 1 adalah Pendahuluan, memuat *Latar Belakang* yang menjelaskan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, Renja Kementerian Kesehatan dan Renja PD Kabupaten/Kota, serta keterkaitan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, *Landasan Hukum*, yang menginformasikan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, *Maksud dan tujuan*, yang menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja PD, dan *Sistematika penulisan*, yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab 2 adalah Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan yang memuat *Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 keadaan triwulan II*, yang berisikan informasi mengenai realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi

program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja; implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, *Analisa Kinerja Pelayanan PD*, yang berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, *Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD*, yang menguraikan tentang sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis lainnya termasuk koordinasi dan sinergi program antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten/Kota, termasuk dengan Kementerian Kesehatan; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, program nasional/internasional seperti Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*; tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti.

Bab 3 adalah Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan PD serta sumber pembiayaannya.

Bab 4 adalah Penutup yang berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya merupakan implementasi terhadap Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam rangka menilai capaian kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan kepada target kinerja yang telah ditetapkan.

Gambaran kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 keadaan Triwulan II secara detail dapat dilihat melalui perbandingan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan realisasinya, sebagai berikut:

1. *Sasaran Strategis 1* : Meningkatnya kesehatan ibu dan anak

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk sasaran strategis 1, dimana keduanya mencapai target yang telah ditetapkan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 Keadaan Triwulan II

NO	INDIKATOR	Target	Realisasi	%
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	67,39 per 100.000 kelahiran hidup	25,83 per 100.000 kelahiran hidup	-
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	2,2 per 1.000 kelahiran hidup	1,69 per 1.000 kelahiran hidup	-

2. *Sasaran Strategis 2* : Meningkatnya status gizi masyarakat

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja untuk sasaran strategis 2, dan telah mencapai target yang telah ditetapkan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.2

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023 Keadaan Triwulan II

No.	INDIKATOR	Target	Realisasi	%
1	Prevalensi stunting pada balita	26,50%	NA	-

3. *Sasaran Strategis 3* : Menurunnya angka kesakitan.

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja untuk sasaran strategis 3, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.3

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2023 Keadaan Triwulan II

No.	INDIKATOR	Target	Realisasi	%
1	Angka kesakitan (morbiditas)	12,20%	NA	-

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp. 3.194.972.285,00 dari target sebesar Rp. 6.705.524.000,00 atau sebesar 47,65%. PAD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 bersumber *retribusi jasa umum*, yaitu retribusi pelayanan kesehatan, *retribusi jasa usaha* yang meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah (retribusi penyewaan bangunan), serta *retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa/mess*. Rendahnya realisasi PAD sampai dengan keadaan 30 Juni 2023 disebabkan masih belum dioperasikannya mess Parapat pasca dilakukan renovasi di tahun 2022 dan rendahnya kunjungan pasien ke UPTD Rumah Sakit Khusus Paru dikarenakan dalam proses relokasi.

Sepanjang Tahun Anggaran 2023, anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bersumber APBD mengalami 4 (empat) kali pergeseran. Pada Pergeseran Kesatu, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melakukan penyempurnaan rincian belanja kegiatan dan Rencana Anggaran Kas (RAK). Pada Pergeseran Kedua, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023, terdapat tambahan anggaran hasil pergeseran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 3.997.949.000,00 dalam rangka pemeliharaan dan pembangunan Gedung dukungan relokasi UPTD RS Khusus Paru. Pada Pergeseran Ketiga, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2023, dilakukan penyempurnaan rincian belanja dan RAK, diantaranya untuk penyempurnaan rincian obat dan BMHP kebutuhan UPTD RS Khusus Mata. Sedangkan pada Pergeseran Keempat, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2023, kembali dilakukan penyempurnaan rincian belanja dan

RAK program/kegiatan/sub kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan. Jumlah alokasi anggaran Tahun 2023 hasil pengeseran dan P.Renja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.4

**Pergeseran/Perubahan Anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2023 per Program**

No	PROGRAM	Murni (Rp.)	Pergeseran Kesatu (Rp.)	Pergeseran Kedua (Rp.)	Pergeseran Ketiga (Rp.)	Pergeseran Keempat (Rp.)	Renja P-APBD (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	171.032.695.352	171.032.695.352	175.030.644.352	175.030.644.352	175.030.644.352	173.586.646.353
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	298.630.168.107	298.630.168.107	298.630.168.107	298.630.168.107	298.630.168.107	288.217.979.028
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.858.443.054	10.858.443.054	10.858.443.054	10.858.443.054	10.858.443.054	8.620.739.054
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	445.206.621	445.206.621	445.206.621	445.206.621	445.206.621	445.206.621
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.130.257.300	3.130.257.300	3.130.257.300	3.130.257.300	3.130.257.300	2.786.308.200
T O T A L		484.096.770.434	484.096.770.434	488.094.719.434	488.094.719.434	488.094.719.434	473.656.879.256

Tabel. 2.5

**Pergeseran/Perubahan Anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2023 per Jenis Belanja**

No	PROGRAM	Murni (Rp.)	Pergeseran Kesatu (Rp.)	Pergeseran Kedua (Rp.)	Pergeseran Ketiga (Rp.)	Pergeseran Keempat (Rp.)	Renja P-APBD (Rp.)
1	Belanja Operasi	461.715.414.287	461.715.414.287	462.738.557.287	462.738.557.287	462.738.557.287	448.901.904.890
1.1	Belanja Pegawai	125.398.247.000	125.398.247.000	125.398.247.000	125.398.247.000	125.398.247.000	124.784.087.000
1.2	Belanja Barang dan Jasa	332.117.167.287	332.117.167.287	333.140.310.287	333.140.310.287	333.140.310.287	319.917.817.890
1.3	Belanja Hibah	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000
2	Belanja Modal	22.381.356.147	22.381.356.147	25.356.162.147	25.356.162.147	25.356.162.147	24.754.974.366
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.371.106.147	21.371.106.147	21.371.106.147	21.371.106.147	21.371.106.147	20.782.918.366
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000	20.000.000	2.994.806.000	2.994.806.000	2.994.806.000	2.994.806.000
2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	977.250.000	977.250.000	977.250.000	977.250.000	977.250.000	977.250.000
2.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0
T O T A L		484.096.770.434	484.096.770.434	488.094.719.434	488.094.719.434	488.094.719.434	473.656.879.256

.....

Realisasi belanja daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 keadaan 30 Juni 2023 sebesar Rp. 223.585.270.853,00 (45,81%), terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 221.560.190.120,00 dari total Belanja Operasi sebesar Rp. 462.738.557.287,00 (47,88%), dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 2.025.080.643,00 dari total Belanja Modal sebesar Rp. 25.356.162.147,00 (7,99%). Bila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 keadaan 30 Juni 2022 (*year on year/yoy*) yaitu sebesar 40,48 persen, maka realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 keadaan 30 Juni 2023 menunjukkan peningkatan kinerja.

Realisasi Belanja Operasi terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 68.779.879.544,00 dari total Belanja Pegawai sebesar Rp. 125.398.247.000,00 (54,85%), realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 148.580.310.666,00 dari total Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 333.140.310.287,00 (44,60%), dan realisasi Belanja Hibah sebesar Rp. 4.200.000.000,00 dari total Belanja Hibah sebesar Rp. 4.200.000.000,00 (100,00%). Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 (*yoy*) yaitu sebesar 41,81 persen, maka realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 keadaan 30 Juni 2023 menunjukkan peningkatan kinerja.

Realisasi Belanja Modal terdiri dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.025.080.643,00 dari total Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 25.356.162.147,00 (7,99%), sedangkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Pagu Rp. 2.994.806.000,00), Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi (Pagu Rp. 977.250.000,00), dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Pagu Rp. 13.000.000,00) masing-masing belum terealisasi. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 (*yoy*) yaitu 10,49 persen, maka realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 keadaan 30 Juni 2023 menunjukkan penurunan kinerja. Hanya saja, pagu belanja modal Dinas Kesehatan di TA. 2022 yang lalu sangat kecil dibandingkan dengan pagu belanja modal yang dialokasikan di TA. 2023.

Sampai dengan keadaan 30 Juni 2023, persentase realisasi belanja terbesar ada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu 49,39 persen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 88.532.314.597,00, diikuti Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar 40,67 persen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.989.736.157,00, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar 36,33 persen dengan realisasi

keuangan sebesar Rp. 134.069.487.985,00, dan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman sebesar 32.02 persen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 141.700.900,00. Realisasi terendah ada pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yaitu sebesar 1.42 persen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.141.000,00.

Tabel. 2.6
Jumlah Alokasi, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran per Jenis Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Keadaan 30 Juni 2023

No.	PROGRAM	Alokasi (Rp.) Keadaan Pergeseran Keempat	Realisasi (Rp.)	(%)
1	Belanja Operasi	462.738.557.287	221.560.190.120	47.88
1.1	Belanja Pegawai	125.398.247.000	68.779.879.544	54.85
1.2	Belanja Barang dan Jasa	333.140.310.287	148.580.310.666	44.60
1.3	Belanja Hibah	4.200.000.000	4.200.000.000	100.0
2	Belanja Modal	25.356.162.147	2.025.080.643	7.99
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.371.106.147	2.025.080.643	9.48
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.994.806.000	0	0.00
2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	977.250.000	0	0.00
2.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.000.000	0	0.00
T O T A L		488.094.719.434	223.585.270.853	45.81

Tabel. 2.7
Jumlah Alokasi, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran per Program APBD Tahun Anggaran 2023 Keadaan 30 Juni 2023

No.	PROGRAM	Alokasi (Rp.) Keadaan Pergeseran IV	Realisasi (Rp.)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	175.030.644.352	85.912.672.029	49.09
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	298.630.168.107	134.062.994.987	44.89
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.858.443.054	3.138.145.217	28.90
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	445.206.621	111.236.170	24.99
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.130.257.300	360.222.450	11.51
T O T A L		572.550.826.226	223.585.270.853	45.81

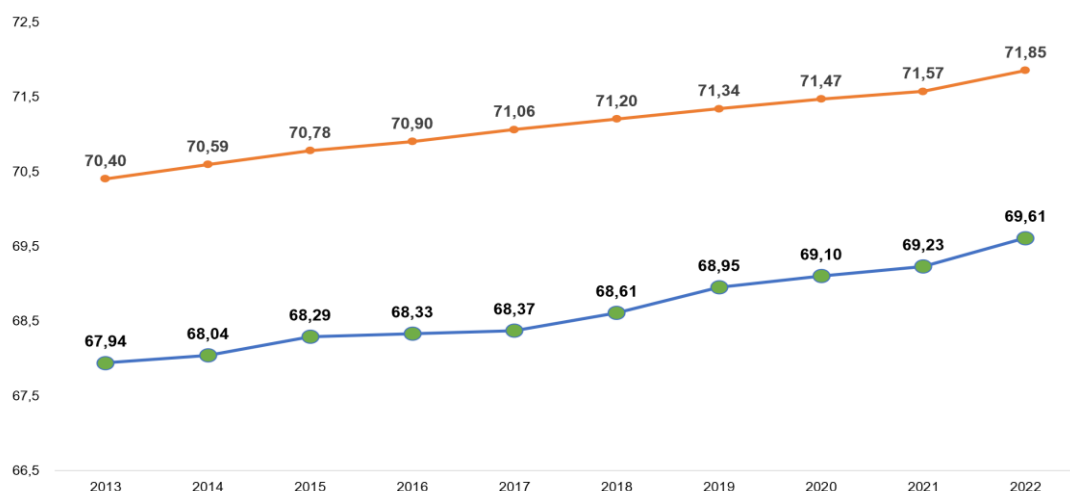
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara harus dipandang memiliki hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal, tanpa diskriminasi.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama 1 (satu) dasawarsa terakhir (periode 2013 hingga 2022), Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 1,67 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,25 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2013, Umur Harapan Hidup saat lahir di Sumatera Utara sebesar 67,94 tahun, dan pada tahun 2022 telah mencapai 69,61 tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan capaian umur Harapan Hidup jika dibandingkan dengan UHH Tahun 2021 yakni 69,23 tahun. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan di Tahun 2022 yakni 69,35 tahun, maka UHH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 sudah mencapai target. Hanya saja, UHH Provinsi Sumatera Utara masih di bawah capaian UHH Nasional. Peningkatan Umur Harapan Hidup penduduk Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar berikut.

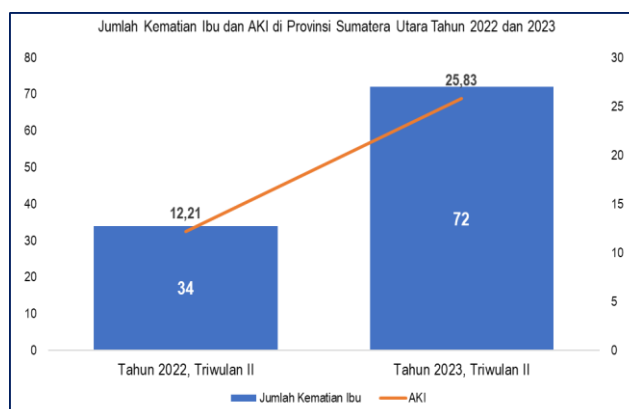
Gambar 2.1

Tren Peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2022



Kasus Kematian Ibu menggambarkan status kesehatan/gizi ibu selama hamil yang rendah, kondisi wanita pada umumnya, kondisi lingkungan dan masih belum memadainya tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, melahirkan dan menyusui. Kematian ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera. Untuk mendapatkan data Angka Kematian Ibu harus dilakukan melalui survei, baik yang dilakukan oleh BPS maupun lembaga-lembaga survei yang sudah diakui baik secara nasional maupun internasional. Namun karena ketiadaan survey maka data yang diperoleh adalah berdasarkan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan Laporan dari Kabupaten/Kota, yakni dari jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran hidup (sasaran ibu hamil) dikali 100.000 Kelahiran Hidup.

Dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2023 sampai dengan keadaan Triwulan II jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara diketahui sebanyak 72 kasus dari 278.756 sasaran lahir

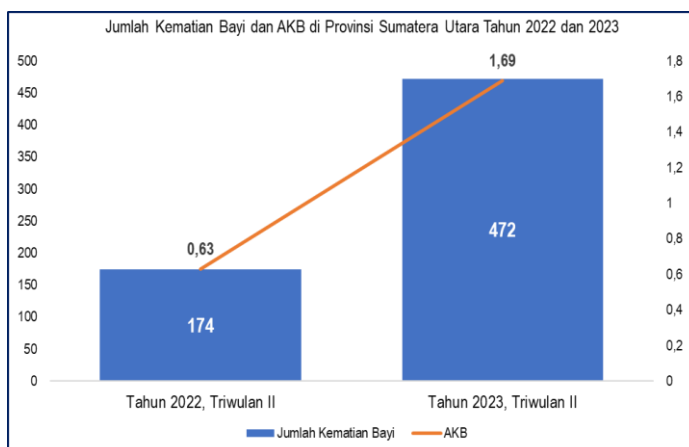


hidup (AKI sebesar 25,83 per 100.000 Kelahiran Hidup/KH), meningkat dibandingkan dengan jumlah kasus kematian ibu di Tahun 2022 keadaan Triwulan II yaitu 34 kasus dari 278.350 sasaran lahir hidup (AKI sebesar 12,21 per 100.000 KH).

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Sama seperti Angka Kematian Ibu (AKI), untuk

mendapatkan data Angka Kematian Bayi harus dilakukan melalui survei, baik yang dilakukan oleh BPS maupun lembaga-lembaga survei yang sudah diakui baik secara nasional maupun internasional. Namun karena ketiadaan survei maka data yang diperoleh adalah berdasarkan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan Laporan dari Kabupaten/Kota, yakni dari jumlah kematian bayi dibagi sasaran lahir hidup dikali 1.000 Kelahiran Hidup.

Dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada Tahun 2023 sampai dengan keadaan Triwulan II jumlah kasus kematian bayi di Provinsi Sumatera Utara diketahui sebanyak 472 kasus dari



278.756 sasaran lahir hidup (AKB sebesar 1,69 per 1.000 KH), meningkat dibandingkan dengan jumlah kasus kematian ibu di Tahun 2022 keadaan Triwulan II yaitu 174 kasus dari 278.350 sasaran lahir hidup (AKB sebesar 0,63 per 100.000 KH).

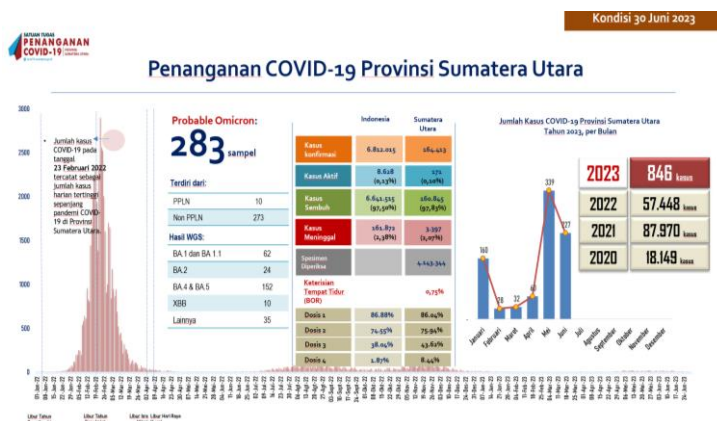
Status gizi berkontribusi terhadap kondisi *sehat-sakit* karena dapat memengaruhi kekebalan tubuh, kerentanan terhadap penyakit serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Gizi yang baik akan menurunkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu masalah gizi yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara adalah *stunting*, yaitu kondisi yang mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas seseorang di masa depan. Kejadian *stunting* merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di Indonesia dan prevalensinya cenderung statis.

Pada tahun 2022 hasil survey Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) diperoleh Prevalensi *Stunting* pada balita di Sumatera Utara sebesar 21,10%, lebih rendah dari Nasional

(21,60%). Capaian Tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan prevalensi stunting jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang lalu sebesar 25,80%. SSGI adalah bagian dari sistem manajemen pembangunan nasional bidang kesehatan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), data stunting harus tersedia setiap tahun sebagai bahan evaluasi, bahan perbaikan kinerja, bahan penyempurnaan program dan kegiatan, sekaligus bahan penentu kebijakan pada tahun berikutnya. Karena hasil survei SSGI Tahun 2023 belum tersedia, maka data prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Utara keadaan Triwulan II belum dapat disajikan.

Angka kesakitan (*morbiditas*) merupakan indikator penting yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Bidang Kesehatan Tahun 2022, Angka Kesakitan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 adalah sebesar 12,98%, lebih rendah dibandingkan dengan angka kesakitan nasional yaitu 13,04%. Angka kesakitan Tahun 2022 menunjukkan penurunan capaian jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang lalu (8,78%). Karena hasil survei SUSENAS Tahun 2023 belum tersedia, maka data prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Utara keadaan Triwulan II belum dapat disajikan.

Sampai dengan keadaan 30 Juni 2023, terdapat 164.413 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara, meningkat 846 kasus dibandingkan dengan jumlah kumulatif kasus COVID-19 sampai dengan Tahun 2022. Jumlah kasus yang telah memiliki hasil akhir (*outcome*) sebanyak 164.242 kasus, dimana 160.845 diantaranya dinyatakan sembuh (*Recovery Rate/RR*



sebesar 97,83%), dan 3.397 lainnya dinyatakan meninggal dunia (*Case Fatality Rate/CFR* sebesar 2.07%). Dengan demikian, kasus aktif diketahui sebesar 171 kasus (0,10%). Kasus harian tertinggi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara tercatat pada tanggal 23 Februari 2022 sebanyak 2.898 kasus. Jumlah spesimen yang telah diperiksa diketahui sebanyak 4.143.344 spesimen (Antigen+PCR). Secara keseluruhan, situasi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara lebih baik dibandingkan dengan situasi COVID-19 Nasional, ditandai dengan *RR* yang lebih tinggi (Nasional 97,50%), dan *CFR* (Nasional 2,38%), dan persentase kasus aktif (Nasional 0,13%) yang lebih rendah.

Selanjutnya, untuk mempermudah pemahaman akan pencapaian kinerja Program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, maka penjelasan tentang realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi, memenuhi dan melebihi target capaian indikator kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan akan diuraikan program per program.

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Outcome yang harus dicapai oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai dengan Renja Tahun 2023 dan sampai keadaan Triwulan II tahun 2023, sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 2.8

Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2023

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Triw. II 2023
1	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	A	NA
2	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%	50%

1.2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Program Kesehatan Masyarakat

Terdapat 85 (delapan puluh empat) Indikator Kinerja yang harus dicapai oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Program Kesehatan Masyarakat sesuai Renja tahun 2023 dan sampai triwulan II tahun 2023, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9

Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Triw. II 2023
1	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	75%	67.48%
2	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Keperawatan kesehatan Masyarakat (Perkesmas) dengan Pendekatan Keluarga	60%	48.95%
3	Persentase FKTP yang Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	50%	45%
4	Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di DTPK	60%	40%
5	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rawat Inap yang Menerapkan Pelayanan Kegawatdaruratan	100%	100%
6	Persentase Fasyankes yang Memenuhi Standar Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	90%	75%
7	Persentase FKTP yang terakreditasi	95%	90,73%
8	Persentase Rumah Sakit Pemerintah Non BUMN/TNI/POLRI yang Terakreditasi	95,3%	84,78%
9	Persentase Laboratorium Kesehatan yang terakreditasi	50%	10,87%
10	Persentase Rumah Sakit yang Menerapkan Standarisasi Klasifikasi sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	90%	79,43%
11	Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	89.47%-
12	Persentase RSUD yang Menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 Jam	100%	80.95%
13	Persentase RSUD Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	100%	77.33%
14	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat di RSUD sesuai Standar	100%	91.11%
15	Cakupan Pelaksanaan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Kab/ Kota	73%	60.60%
16	Persentase Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan sesuai Standar di Rumah Sakit Khusus Mata	95%	-
17	Persentase Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan sesuai Standar di Rumah Sakit Khusus Paru	95%	-

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Triw. II 2023
18	Persentase Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan sesuai Standar di UPT RS Kusta Lau Simomo	90%	-
19	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan sesuai Standar di UPT .Laboratorium Kesehatan	84,5%	-
20	Persentase Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan sesuai Standar di Rumah Sakit Indrapura	95%	-
21	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan (per mil)		1.6
22	Prevalensi Stunting (Pendek) dan Sangat Pendek pada balita	26,5%	-
23	Prevalensi Wasting (Gizi kurang dan Gizi Buruk) pada balita	5%	1.7%
24	Cakupan Bayi Kurang 6 Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif	57%	49.7%
25	Persentase kabupaten/kota melakukan surveilans gizi	45%	22%
26	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)		5.2%
27	Persentase ibu hamil mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	80%	78%
28	Persentase Puskesmas mampu Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita	20%	-
29	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat MP-ASI	75%	82%
30	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	29,12%
31	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	30,01%
32	Cakupan pelayanan nifas sesuai standar	100%	23.19%
33	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	29,87%
34	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	100%	27,84%
35	Persentase anak usia kesehatan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-
36	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	22%
37	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	75%	71%
38	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja	85%	75%

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Triw. II 2023
39	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	75%	80.27%
40	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang Dilakukan Pengawasan	50%	52%
41	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Dilakukan Pengawasan	45%	38.9%
42	Persentase Fasyankes Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar	60%	43%
43	Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat	15 kab/kota	12 kab/kota
44	Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	75%	18.77%
45	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12-23 bulan	75%	-
46	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	94,6%	29.3%
47	Jumlah kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	30 kab/kota	-
48	Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapatkan Imunisasi lanjutan Campak Rubella	90,3%	-
49	Persentase anak sekolah dasar yang mendapatkan Imunisasi lanjutan Difteri Tetanus (DT)	93%	-
50	Angka Non Polio Acute Flacyd Paralysis (AFP) per 100.000 anak usia <15 tahun	≥2	-
51	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi	100%	100%
52	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk yang terdampak Penyakit Infeksi Emerging	95%	90%
53	Persentase Kabupaten/kota yang merespon Alert SKDR minimal	80%	75%
54	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100%	100%
55	Persentase Jemaah Haji yang Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	100%
56	Angka Mikrofilaria Rate (Mf rate)	<1%	<1%
57	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis B	90%	91%

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Triw. II 2023
58	CFR diare pada saat KLB	<1,2%	0%
59	Prevalensi kecacingan pada anak sekolah	<10%	11.8%
60	Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	<49	14.2%
61	Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk (API)	0,09	0,06
62	Angka Case Detection Rate penyakit TB	76%	25,5%
63	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate)	90%	90%
64	Prevalensi HIV-AIDS	<0,5%	<0,5%
65	Angka zoonosis lainnya (Flu burung, rabies, antraks, leptopirosis) yang ditangani sesuai standar	80%	77%
66	Cakupan penemuan dan tata laksana kasus pneumonia pada balita	55%	77%
67	Angka penemuan kasus baru frambusia Per 100.000 penduduk	<0,1	0
68	Angka penemuan kasus baru kusta per 100.000 penduduk	<5%	0,52
69	Angka Cacat Kusta tingkat 2	<10%	4%
70	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Paling Kurang 40% Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	24 kab/kota	6 kab/kota
71	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki paling kurang 80% Puskesmas melakukan pelayanan terpadu PTM sesuai standar	20 kab/kota	6 kab/kota
72	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	24.93%
73	Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	60.26%
74	Jumlah Kab/kota yang memiliki cakupan deteksi dini faktor risiko penyakit Tidak Menular paling kurang 80%	10 kab/kota	0 kab/kota
75	Jumlah kab/kota yang memiliki paling kurang 80% Puskesmas melakukan deteksi dini penyakit kanker	23 kab/kota	27 kab/kota
76	Jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera > 40% populasi	5 kab/kota	5 kab/kota
77	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	60%
78	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza di 30 % SMA/ sederajat	27 kab/kota	22 kab/kota
79	Jumlah Kab/Kota yang memiliki 30 % Puskesmas yang menyelenggarakan upaya	27 kab/kota	22 kab/kota

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Triw. II 2023
	kesehatan jiwa sesuai standar		
80	Persentase pecandu, Penyalahguna Napza yang Menjalani Program Rehabilitasi di Fasyankes	1,5%	1.65%
81	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80,3%	86.19%
82	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensia	96%	87.84%
83	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	69%	58.45%
84	Persentase kab/kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100%	100%

1.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja yang harus dicapai oleh **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** sesuai dengan Renja Tahun 2023, Keadaan sampai Triwulan II tahun 2023, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10

Capaian Kinerja Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2023

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Triw. II 2023
1	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (Sembilan) jenis tenaga Kesehatan	50%	34.42%
2	Persentase Tenaga Kesehatan yang Dilatih pada Pelatihan Terakreditasi	3%	1.76%
3	Persentase Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	30%	32%
4	Persentase Rumah Sakit yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	55%	70.27%

1.4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Makanan Minuman

Dari 6 (enam) indikator kinerja yang harus dicapai oleh **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman** sampai Triwulan II tahun 2023, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11

**Capaian Kinerja Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
Tahun 2023**

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Triw. II 2023
1	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan Perizinan	100%	93%
2	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha	100%	100%
3	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang menerapkan CPAKB, CPPKRTB dan CDAKB	90%	88%
4	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian	60%	56.80%
5	Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas	70%	70.57%
6	Persentase sarana produksi kefarmasian yang dibina agar memenuhi standar cara produksi yang baik	75%	73.62%

1.5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang harus dicapai oleh **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** sesuai dengan Renja Tahun 2023 dan Sampai Triwulan II tahun 2023, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12

Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Triw. II 2023
1	Persentase kab/kota yang melaksanakan Germas	75%	70%
2	Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif	60%	47%
3	Persentase Posyandu Aktif	90%	56%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tahun 2023 adalah tahun terakhir (tahun kelima) RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019–2023 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2019–2023. Pada Pemilukada yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018, terdapat Gubernur dan

.....

Wakil Gubernur terpilih yaitu pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah yang telah dilantik pada tanggal 5 September 2018 dengan visi '**Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat**'. Adapun misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

- (1) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- (2) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat disertai harmonis.
- (3) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- (4) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia.
- (5) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah dan berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab.

Program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun dalam P.Renja PD Tahun 2023 ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023 dan perubahannya, khususnya dalam upaya mencapai misi ke-1, yaitu *bermartabat dalam kehidupan karena memiliki kesehatan yang prima*, yang diselaraskan dengan arah kebijakan, Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas pembangunan kesehatan nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa Provinsi memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan SPM kesehatan yang terdiri dari (a) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan (b) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Kedua indikator

SPM Provinsi tersebut telah diintegrasikan dalam P.Renja PD Tahun 2023 dan telah disesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan. Berdasarkan evaluasi hasil capaian pembangunan kesehatan, diketahui bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara masih belum menggembirakan. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya capaian sasaran strategis, masih lemahnya mekanisme koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan sinkronisasi/integrasi perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pembangunan kesehatan, serta politik anggaran yang belum menjadikan pembangunan sektor kesehatan sebagai isu penting dalam pembangunan Sumatera Utara, yang dibuktikan dengan masih rendahnya alokasi anggaran kesehatan bila dibandingkan dengan tuntutan Undang-Undang yang berlaku (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 171 ayat 2).

Lebih lanjut, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dihadapkan pada beban multi penyakit (*triple burden of diseases*) serta meningkatnya populasi penduduk usia lanjut. Beban multi penyakit ditandai dengan perubahan pola penyakit penyebab kematian dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (transisi epidemiologi), disertai dengan munculnya penyakit-penyakit baru (*emerging diseases*) seperti pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Pertambahan populasi penduduk usia lanjut (sebagai konsekuensi meningkatnya umur harapan hidup waktu lahir dan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan) juga dapat berimplikasi pada sistem kesehatan. Situasi tersebut berdampak pada perubahan kebutuhan jenis tenaga kesehatan, tuntutan akan pelayanan kesehatan yang lebih maju, serta kebutuhan biaya kesehatan yang lebih besar. Tantangan lain yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah bagaimana mereduksi disparitas status kesehatan masyarakat antar wilayah termasuk dalam hal disparitas pembiayaan kesehatan, persebaran tenaga kesehatan, dan ketersediaan sarana dan teknologi kedokteran dalam mewujudkan keadilan (*equity*) dan pemerataan (*equality*) pembangunan kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga dihadapkan pada semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan ketersediaan fasilitas kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

Pelayanan kesehatan diharapkan menjangkau populasi yang belum/tidak terjangkau serta melayani masyarakat yang tidak terlayani, termasuk mereka yang rentan (*vulnerable groups*). Regionalisasi RS dan sistem rujukan terintegrasi yang diharapkan menjadi solusi bagi kompleksitas pelayanan rujukan di Sumatera Utara, dalam implementasinya belum memberikan hasil yang memuaskan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar serta dalam menciptakan kepuasan konsumen kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pemerintah juga dihadapkan pada pencapaian target indikator-indikator yang dituangkan dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), yang merupakan agenda pembangunan Pasca MDGs 2015. Di sisi lain, Pasar Bebas Asean (*Asean free trade*) dan Masyarakat Ekonomi Asean (*Asean Economic Community*) telah pula berlaku.

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, asuransi kesehatan yang sebelumnya dikelola oleh beberapa lembaga menjadi terintegrasi pada satu badan, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang telah beroperasi mulai 1 Januari 2014 melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sampai dengan April tahun 2020, capaian persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 72,43%, masih jauh dari target minimal cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage/UHC*) yaitu sebesar 95%. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di luar Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam mengikuti program JKN/KIS mandiri, serta adanya kenaikan iur premi PBI yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga membebani pembiayaan jaminan kesehatan yang telah dianggarkan. Perlu kerja keras dan kerja sama semua pihak dalam upaya meningkatkan capaian JKN/KIS dimaksud.

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang melanda dunia juga memberikan dampak yang signifikan bagi negara Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di samping berdampak pada sektor kesehatan yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan angka kematian (*infection fatality rate*),

COVID-19 juga memberikan dampak kepada sektor perekonomian yang berakibat pada rendahnya potensi penerimaan negara dan daerah. Rendahnya potensi penerimaan daerah selanjutnya berkontribusi pada rendahnya belanja daerah, sehingga membutuhkan restrukturisasi program/kegiatan dan prioritas belanja kesehatan.

2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD

Program/kegiatan/sub kegiatan pada P.Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 merupakan penyempurnaan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang terdapat pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2023 disusun dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan Keempat, yaitu **Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas** dengan menekankan pada strategi utama *Membangun Desa Menata Kota*. Seluruh program/kegiatan/sub kegiatan pada P.Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 telah memedomani nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sepanjang tahun 2023, anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bersumber APBD mengalami 4 (empat) kali pergeseran. Pada Pergeseran Kesatu, tidak terdapat perubahan postur anggaran, hanya dilakukan penyempurnaan rincian belanja kegiatan RAK. Pada Pergeseran Kedua, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 3.997.949.000,00 dalam rangka pemeliharaan dan pembangunan gedung dukungan relokasi UPTD RS Khusus Paru. Pergeseran Ketiga dilakukan penyempurnaan rincian belanja kegiatan dan RAK, diantaranya untuk penyempurnaan rincian belanja obat dan BMHP kebutuhan UPTD RS Khusus Mata. Pergeseran Keempat juga dilakukan dalam rangka penyempurnaan rincian belanja kegiatan dan RAK.

Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada serentak di Tahun 2024, dimana daerah harus mengalokasikan dukungan pembiayaan penyelenggaraan Pilkada serentak bersumber APBD sebesar 40 persen dari kebutuhan penyelenggara (KPU dan Bawaslu), serta dalam rangka pemenuhan anggaran untuk dukungan penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dimana Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu penyelenggara (bersama dengan Provinsi Aceh), maka dilakukan efisiensi anggaran belanja kegiatan bersumber APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2023 yang selanjutnya berimplikasi pada berbedanya pagu anggaran antara Pergeseran IV APBD TA. 2023 dengan P.Renja Tahun 2023.

Jumlah alokasi anggaran Tahun 2023 hasil pergeseran dan P.Renja per program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Pergeseran 1 (Rp.)	Pagu Pergeseran 2 (Rp.)	Pagu Pergeseran 3 (Rp.)	Pagu Pergeseran 4 (Rp.)	P-Renja (Rp.)	Ket.
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	484.096.770.434	484.096.770.434	488.094.719.434	488.094.719.434	488.094.719.434	473.656.879.256	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	171.032.695.352	171.032.695.352	175.030.644.352	175.030.644.352	175.030.644.352	173.586.646.353	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Pergeseran 1 (Rp.)	Pagu Pergeseran 2 (Rp.)	Pagu Pergeseran 3 (Rp.)	Pagu Pergeseran 4 (Rp.)	P-Renja (Rp.)	Ket.
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.056.652.045	1.056.652.045	1.056.652.045	1.056.652.045	1.056.652.045	958.259.322	
1.02.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	435.335.595	435.335.595	435.335.595	435.335.595	435.335.595	421.338.595	
1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	18.884.950	18.884.950	18.884.950	18.884.950	18.884.950	18.884.950	
1.02.01.1.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	40.578.000	40.578.000	40.578.000	40.578.000	40.578.000	66.728.000	
1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	13.584.850	13.584.850	13.584.850	13.584.850	13.584.850	13.584.850	
1.02.01.1.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	43.082.850	43.082.850	43.082.850	43.082.850	43.082.850	66.878.127	
1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	36.324.000	36.324.000	36.324.000	36.324.000	36.324.000	36.324.000	
1.02.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	468.861.800	468.861.800	468.861.800	468.861.800	468.861.800	334.520.800	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	126.196.619.400	126.196.619.400	126.196.619.400	126.196.619.400	126.196.619.400	126.178.178.200	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	123.885.047.000	123.885.047.000	123.885.047.000	123.885.047.000	123.885.047.000	130.446.410.252	
1.02.01.1.02.02	Penyediaan administrasi dan pelaksanaan tugas ASN	807.240.000	807.240.000	807.240.000	807.240.000	807.240.000	538.680.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.1.02.02	Penyediaan administrasi dan pelaksanaan tugas ASN	88.680.000	88.680.000	88.680.000	88.680.000	88.680.000	65.880.000	UPTD. RS Khusus Mata
1.02.01.1.02.02	Penyediaan administrasi dan pelaksanaan tugas ASN	99.720.000	99.720.000	99.720.000	99.720.000	99.720.000	89.100.000	UPTD. RS Khusus Paru
1.02.01.1.02.02	Penyediaan administrasi dan pelaksanaan tugas ASN	92.040.000	92.040.000	92.040.000	92.040.000	92.040.000	76.680.000	UPTD. RSU Kusta Lau Simomo
1.02.01.1.02.02	Penyediaan administrasi dan pelaksanaan tugas ASN	866.610.000	866.610.000	866.610.000	866.610.000	866.610.000	1.202.775.000	UPTD. Laboratorium Kesehatan (termasuk pengembalian jasa medis)
1.02.01.1.02.02	Penyediaan administrasi dan pelaksanaan tugas ASN	78.120.000	78.120.000	78.120.000	78.120.000	78.120.000	53.700.000	UPTD. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	148.864.000	148.864.000	148.864.000	148.864.000	148.864.000	132.087.200	
1.02.01.1.02.04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	27.527.000	27.527.000	27.527.000	27.527.000	27.527.000	19.095.000	
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	14.025.000	14.025.000	14.025.000	14.025.000	14.025.000	14.025.000	
1.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	35.660.000	35.660.000	35.660.000	35.660.000	35.660.000	51.751.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Pergeseran 1 (Rp.)	Pagu Pergeseran 2 (Rp.)	Pagu Pergeseran 3 (Rp.)	Pagu Pergeseran 4 (Rp.)	P-Renja (Rp.)	Ket.
1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	53.266.000	53.266.000	53.266.000	53.266.000	53.266.000	49.358.000	
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	310.985.000	310.985.000	310.985.000	310.985.000	310.985.000	38.585.000	
1.02.01.1.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	3.975.000	3.975.000	3.975.000	3.975.000	3.975.000	3.975.000	
1.02.01.1.03.03	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	5.880.000	5.880.000	5.880.000	5.880.000	5.880.000	5.880.000	
1.02.01.1.03.04	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	11.760.000	11.760.000	11.760.000	11.760.000	11.760.000	11.760.000	
1.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	16.970.000	16.970.000	16.970.000	16.970.000	16.970.000	16.970.000	
1.02.01.1.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	272.400.000	272.400.000	272.400.000	272.400.000	272.400.000	0	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	587.736.000	587.736.000	587.736.000	587.736.000	587.736.000	587.736.000	
1.02.01.1.05.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	11.730.000	11.730.000	11.730.000	11.730.000	11.730.000	11.730.000	
1.02.01.1.05.04	Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	43.410.000	43.410.000	43.410.000	43.410.000	43.410.000	43.410.000	
1.02.01.1.05.05	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	20.274.000	20.274.000	20.274.000	20.274.000	20.274.000	20.274.000	
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	463.194.000	463.194.000	463.194.000	463.194.000	463.194.000	463.194.000	
1.02.01.1.05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	49.128.000	49.128.000	49.128.000	49.128.000	49.128.000	49.128.000	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.452.993.421	5.452.993.421	5.452.993.421	5.452.993.421	5.452.993.421	5.432.654.333	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	92.664.189	92.664.189	92.664.189	92.664.189	92.664.189	92.664.189	Kantor Dinkes
1.02.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	55.410.853	55.410.853	55.410.853	55.410.853	55.410.853	55.410.853	UPTD. RS Khusus Mata
1.02.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	79.511.350	79.511.350	79.511.350	79.511.350	79.511.350	79.511.350	UPTD. RS Khusus Paru
1.02.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60.852.002	60.852.002	60.852.002	60.852.002	60.852.002	60.852.002	UPTD. RSU Kusta Lau Simomo
1.02.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	36.727.380	36.727.380	36.727.380	36.727.380	36.727.380	36.727.380	UPTD. Laboratorium Kesehatan
1.02.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	49.686.920	49.686.920	49.686.920	49.686.920	49.686.920	49.686.920	UPTD. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	394.054.269	394.054.269	394.054.269	394.054.269	394.054.269	394.054.269	Kantor Dinkes (penyediaan ATK)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Pergeseran 1 (Rp.)	Pagu Pergeseran 2 (Rp.)	Pagu Pergeseran 3 (Rp.)	Pagu Pergeseran 4 (Rp.)	P-Renja (Rp.)	Ket.
1.02.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	115.443.725	115.443.725	115.443.725	115.443.725	115.443.725	115.443.725	UPTD. RS Khusus Mata (penyediaan ATK)
1.02.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	84.999.456	84.999.456	84.999.456	84.999.456	84.999.456	84.999.456	UPTD. RS Khusus Paru (penyediaan ATK)
1.02.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	95.252.831	95.252.831	95.252.831	95.252.831	95.252.831	95.252.831	UPTD. RSU Kusta Lau Simomo (penyediaan ATK)
1.02.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	63.340.205	63.340.205	63.340.205	63.340.205	63.340.205	63.340.205	UPTD. Laboratorium Kesehatan (penyediaan ATK)
1.02.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	70.702.172	70.702.172	70.702.172	70.702.172	70.702.172	69.068.222	UPTD. Pelatihan Kesehatan (penyediaan ATK)
1.02.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	131.190.170	131.190.170	131.190.170	131.190.170	131.190.170	131.189.272	Kantor Dinkes (penyediaan peralatan kebersihan dll)
1.02.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	135.955.289	135.955.289	135.955.289	135.955.289	135.955.289	135.955.289	UPTD. RS Khusus Mata (penyediaan peralatan kebersihan)
1.02.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	119.971.710	119.971.710	119.971.710	119.971.710	119.971.710	119.971.710	UPTD. RS Khusus Paru (penyediaan peralatan kebersihan)
1.02.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	84.531.765	84.531.765	84.531.765	84.531.765	84.531.765	84.531.765	UPTD. RSU Kusta Lau Simomo (penyediaan peralatan kebersihan)
1.02.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	106.735.155	106.735.155	106.735.155	106.735.155	106.735.155	106.735.155	UPTD. Laboratorium Kesehatan (penyediaan peralatan kebersihan)
1.02.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	174.573.655	174.573.655	174.573.655	174.573.655	174.573.655	174.573.655	UPTD. Pelatihan Kesehatan (penyediaan peralatan kebersihan)
1.02.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	202.279.400	202.279.400	202.279.400	202.279.400	202.279.400	202.279.400	Kantor Dinkes
1.02.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	101.428.500	101.428.500	101.428.500	101.428.500	101.428.500	101.428.500	UPTD. RS Khusus Mata
1.02.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	186.740.200	186.740.200	186.740.200	186.740.200	186.740.200	186.733.460	UPTD. RS Khusus Paru
1.02.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	79.994.825	79.994.825	79.994.825	79.994.825	79.994.825	79.944.825	UPTD. RSU Kusta Lau Simomo
1.02.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.297.500	50.297.500	50.297.500	50.297.500	50.297.500	50.297.500	UPTD. Laboratorium Kesehatan
1.02.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33.925.400	33.925.400	33.925.400	33.925.400	33.925.400	33.925.400	UPTD. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	55.752.000	55.752.000	55.752.000	55.752.000	55.752.000	55.752.000	Kantor Dinkes
1.02.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.058.000	10.058.000	10.058.000	10.058.000	10.058.000	10.058.000	UPTD. RS Khusus Mata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Pergeseran 1 (Rp.)	Pagu Pergeseran 2 (Rp.)	Pagu Pergeseran 3 (Rp.)	Pagu Pergeseran 4 (Rp.)	P-Renja (Rp.)	Ket.
1.02.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.060.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000	UPTD. RS Khusus Paru
1.02.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.924.000	14.924.000	14.924.000	14.924.000	14.924.000	14.924.000	UPTD. RSU Kusta Lau Simomo
1.02.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	UPTD. Laboratorium Kesehatan
1.02.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.197.500	17.197.500	17.197.500	17.197.500	17.197.500	0	UPTD. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	356.160.000	356.160.000	356.160.000	356.160.000	356.160.000	356.160.000	Kantor Dinkes
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2.089.964.000	2.089.964.000	2.089.964.000	2.089.964.000	2.089.964.000	2.089.964.000	Kantor Dinkes
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	UPTD. RS Khusus Mata
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	43.500.000	UPTD. RS Khusus Paru
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	56.190.000	56.190.000	56.190.000	56.190.000	56.190.000	56.190.000	UPTD. RSU Kusta Lau Simomo
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	61.920.000	61.920.000	61.920.000	61.920.000	61.920.000	61.920.000	UPTD. Laboratorium Kesehatan
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	46.829.000	46.829.000	46.829.000	46.829.000	46.829.000	46.829.000	UPTD. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	Kantor Dinkes
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.924.506.378	10.924.506.378	10.924.506.378	10.924.506.378	10.924.506.378	10.811.716.878	
1.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.084.559.034	7.084.559.034	7.084.559.034	7.084.559.034	7.084.559.034	7.050.559.034	Kantor Dinkes KSD Bis Medis
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	556.205.744	556.205.744	556.205.744	556.205.744	556.205.744	535.756.744	Kantor Dinkes
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	0	0	0	0	0	0	UPTD. RS Khusus Mata
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	131.116.950	131.116.950	131.116.950	131.116.950	131.116.950	131.116.950	UPTD. RS Khusus Paru
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	289.169.697	289.169.697	289.169.697	289.169.697	289.169.697	283.094.735	UPTD. RSU Kusta Lau Simomo
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	790.322.600	790.322.600	790.322.600	790.322.600	790.322.600	790.322.600	UPT. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	825.510.332	825.510.332	825.510.332	825.510.332	825.510.332	824.567.118	Kantor Dinkes
1.02.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	63.123.466	63.123.466	63.123.466	63.123.466	63.123.466	63.123.466	UPTD. RS Khusus Mata
1.02.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	320.177.705	320.177.705	320.177.705	320.177.705	320.177.705	320.177.705	UPTD. RS Khusus Paru
1.02.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	146.073.945	146.073.945	146.073.945	146.073.945	146.073.945	146.073.945	UPTD. RSU Kusta Lau Simomo
1.02.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	516.480.122	516.480.122	516.480.122	516.480.122	516.480.122	516.480.122	UPTD. Laboratorium Kesehatan
1.02.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	78.102.660	78.102.660	78.102.660	78.102.660	78.102.660	78.102.660	UPTD. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	123.664.123	123.664.123	123.664.123	123.664.123	123.664.123	72.341.799	UPT. Pelatihan Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Pergeseran 1 (Rp.)	Pagu Pergeseran 2 (Rp.)	Pagu Pergeseran 3 (Rp.)	Pagu Pergeseran 4 (Rp.)	P-Renja (Rp.)	Ket.
1.02.01.1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	20.000.946.460	20.000.946.460	20.000.946.460	20.000.946.460	20.000.946.460	19.320.960.972	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	29.600.000	29.600.000	29.600.000	29.600.000	29.600.000	29.600.000	Kantor Dinkes
1.02.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	UPTD. RS Khusus Mata
1.02.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	UPTD. RS Khusus Paru
1.02.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	UPTD. RSU Kusta Lau Simomo
1.02.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	6.170.000	6.170.000	6.170.000	6.170.000	6.170.000	6.170.000	UPTD. Laboratorium Kesehatan
1.02.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	UPTD. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	Kantor Dinkes
1.02.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	UPTD. RS Khusus Mata
1.02.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	310.000.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000	348.000.000	UPTD. RS Khusus Paru
1.02.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	UPTD. RSU Kusta Lau Simomo
1.02.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	511.000.000	511.000.000	511.000.000	511.000.000	511.000.000	461.000.000	UPTD. Laboratorium Kesehatan
1.02.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	695.000.000	UPTD. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	13.228.796.796	13.228.796.796	13.228.796.796	13.228.796.796	13.228.796.796	12.400.463.472	Kantor Dinkes (honor BP-JHC, Dewas RS, security, CS, tenaga kontrak, dll)
1.02.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	706.753.960	706.753.960	706.753.960	706.753.960	706.753.960	752.953.274	UPTD. RS Khusus Mata (tenaga kontrak, dll)
1.02.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	986.300.528	986.300.528	986.300.528	986.300.528	986.300.528	1.050.192.272	UPTD. RS Khusus Paru (tenaga kontrak, dll)
1.02.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	418.407.392	418.407.392	418.407.392	418.407.392	418.407.392	441.507.126	UPTD. RSU Kusta Lau Simomo (tenaga kontrak, dll)
1.02.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	356.706.532	356.706.532	356.706.532	356.706.532	356.706.532	372.363.724	UPTD. Laboratorium Kesehatan (tenaga kontrak, dll)
1.02.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	268.821.252	268.821.252	268.821.252	268.821.252	268.821.252	285.321.104	UPTD. Pelatihan Kesehatan (tenaga kontrak, dll)
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.502.256.648	6.502.256.648	10.500.205.648	10.500.205.648	10.500.205.648	10.258.555.648	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	230.520.000	230.520.000	230.520.000	230.520.000	230.520.000	230.520.000	Kantor Dinkes

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Pergeseran 1 (Rp.)	Pagu Pergeseran 2 (Rp.)	Pagu Pergeseran 3 (Rp.)	Pagu Pergeseran 4 (Rp.)	P-Renja (Rp.)	Ket.
1.02.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	33.470.000	33.470.000	33.470.000	33.470.000	33.470.000	33.470.000	UPTD. RS Khusus Mata
1.02.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	33.470.000	33.470.000	33.470.000	33.470.000	33.470.000	33.470.000	UPTD. RS Khusus Paru
1.02.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	33.470.000	33.470.000	33.470.000	33.470.000	33.470.000	33.470.000	UPTD. RSU Kusta Lau Simomo
1.02.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	33.470.000	33.470.000	33.470.000	33.470.000	33.470.000	33.470.000	UPTD. Laboratorium Kesehatan
1.02.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	33.470.000	33.470.000	33.470.000	33.470.000	33.470.000	33.470.000	UPTD. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	776.300.000	776.300.000	776.300.000	776.300.000	776.300.000	776.300.000	Kantor Dinkes
1.02.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	UPTD. RS Khusus Mata
1.02.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	UPTD. RS Khusus Paru
1.02.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	UPTD. RSU Kusta Lau Simomo
1.02.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	UPTD. Laboratorium Kesehatan
1.02.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	UPTD. Pelatihan Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Pergeseran 1 (Rp.)	Pagu Pergeseran 2 (Rp.)	Pagu Pergeseran 3 (Rp.)	Pagu Pergeseran 4 (Rp.)	P-Renja (Rp.)	Ket.
1.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	UPTD. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	594.695.000	594.695.000	594.695.000	594.695.000	594.695.000	594.695.000	Kantor Dinkes
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	73.246.598	73.246.598	73.246.598	73.246.598	73.246.598	73.246.598	UPTD. RS Khusus Mata
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	115.300.000	115.300.000	115.300.000	115.300.000	115.300.000	91.800.000	UPTD. RS Khusus Paru
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	UPTD. RSU Kusta Lau Simomo
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	257.049.000	257.049.000	257.049.000	257.049.000	257.049.000	257.049.000	UPTD. Laboratorium Kesehatan
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	86.700.000	86.700.000	86.700.000	86.700.000	86.700.000	86.700.000	UPTD. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	480.648.550	480.648.550	4.478.597.550	4.478.597.550	4.478.597.550	4.500.197.550	Kantor Dinkes
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	1.864.750.000	1.864.750.000	1.864.750.000	1.864.750.000	1.864.750.000	1.625.000.000	UPTD. RS Khusus Paru
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	1.134.517.500	1.134.517.500	1.134.517.500	1.134.517.500	1.134.517.500	1.134.517.500	UPTD. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	228.680.000	228.680.000	228.680.000	228.680.000	228.680.000	228.680.000	UPTD. RS Khusus Paru
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.800.000	37.800.000	37.800.000	37.800.000	37.800.000	37.800.000	UPTD. Pelatihan Kesehatan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	298.630.168.107	298.630.168.107	298.630.168.107	298.630.168.107	298.630.168.107	288.217.979.028	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	29.218.229.980	29.218.229.980	29.218.229.980	29.218.229.980	29.218.229.980	27.980.353.203	
1.02.02.1.01.06	Pengembangan pendekatan pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	3.955.107.400	3.955.107.400	3.955.107.400	3.955.107.400	3.955.107.400	3.955.107.400	Kantor Dinkes
1.02.02.1.01.06	Pengembangan pendekatan pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	488.120.221	488.120.221	488.120.221	488.120.221	488.120.221	488.120.221	UPTD. RS Khusus Mata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Pergeseran 1 (Rp.)	Pagu Pergeseran 2 (Rp.)	Pagu Pergeseran 3 (Rp.)	Pagu Pergeseran 4 (Rp.)	P-Renja (Rp.)	Ket.
1.02.02.1.01.06	Pengembangan pendekatan pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	324.085.218	324.085.218	324.085.218	324.085.218	324.085.218	221.320.000	UPTD. RS Khusus Paru
1.02.02.1.01.06	Pengembangan pendekatan pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	273.700.528	273.700.528	273.700.528	273.700.528	273.700.528	273.700.528	UPTD. Laboratorium Kesehatan
1.02.02.1.01.12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	111.125.161	111.125.161	111.125.161	111.125.161	111.125.161	0	UPTD. RSU Kusta Lau Simomo
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk, Habis Pakai Lainnya)	33.132.750	33.132.750	33.132.750	33.132.750	33.132.750	33.132.750	UPTD. RSU Kusta Lau Simomo
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/ Peralatan Laboratorium Kesehatan	1.130.992.904	1.130.992.904	1.130.992.904	1.130.992.904	1.130.992.904	1.117.616.312	UPTD. RS Khusus Paru
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	131.121.000	131.121.000	131.121.000	131.121.000	131.121.000	131.121.000	UPTD. RS Khusus Paru
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/ Peralatan Laboratorium Kesehatan	7.617.461.543	7.617.461.543	7.617.461.543	7.617.461.543	7.617.461.543	6.697.982.773	UPTD. Laboratorium Kesehatan
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	136.800.700	136.800.700	136.800.700	136.800.700	136.800.700	136.800.700	Kantor Dinkes
1.02.02.1.01.22	Pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas Kesehatan lainnya	15.016.582.555	15.016.582.555	15.016.582.555	15.016.582.555	15.016.582.555	14.925.451.519	Kantor Dinkes
1.02.02.1.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</i>	267.338.807.829	267.338.807.829	267.338.807.829	267.338.807.829	267.338.807.829	258.477.975.647	
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	682.017.189	682.017.189	682.017.189	682.017.189	682.017.189	682.017.189	SPM Provinsi
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	7.925.702.686	7.925.702.686	7.925.702.686	7.925.702.686	7.925.702.686	5.435.869.476	SPM Provinsi; Tagging penanganan COVID-19
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu dan anak	1.886.400.200	1.886.400.200	1.886.400.200	1.886.400.200	1.886.400.200	1.701.349.200	
1.02.02.1.02.04	Pengelolaan pelayanan Kesehatan usia produktif	265.133.000	265.133.000	265.133.000	265.133.000	265.133.000	103.695.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Pergeseran 1 (Rp.)	Pagu Pergeseran 2 (Rp.)	Pagu Pergeseran 3 (Rp.)	Pagu Pergeseran 4 (Rp.)	P-Renja (Rp.)	Ket.
1.02.02.1.02.05	Pengelolaan pelayanan Kesehatan usia lanjut	276.641.500	276.641.500	276.641.500	276.641.500	276.641.500	271.141.500	
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat	6.865.877.000	6.865.877.000	6.865.877.000	6.865.877.000	6.865.877.000	6.808.441.880	KSD PMT Bumil KEK dan Balita kurus; Tagging Penurunan Stunting
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	521.542.000	521.542.000	521.542.000	521.542.000	521.542.000	445.330.000	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan pelayanan Kesehatan lingkungan	748.349.840	748.349.840	748.349.840	748.349.840	748.349.840	748.349.840	
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan pelayanan promosi Kesehatan	2.425.840.900	2.425.840.900	2.425.840.900	2.425.840.900	2.425.840.900	2.417.185.900	KSD GERMAS
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan pelayanan Kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	131.669.400	131.669.400	131.669.400	131.669.400	131.669.400	131.669.400	
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	4.678.137.839	4.678.137.839	4.678.137.839	4.678.137.839	4.678.137.839	4.654.031.684	Terdapat belanja hibah uang untuk YKI sebesar 1.7M
1.02.02.1.02.12	Pengelolaan pelayanan Kesehatan haji	79.058.000	79.058.000	79.058.000	79.058.000	79.058.000	79.058.000	
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	387.546.340	387.546.340	387.546.340	387.546.340	387.546.340	387.546.340	
1.02.02.1.02.14	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA	206.808.000	206.808.000	206.808.000	206.808.000	206.808.000	107.354.000	
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan jaminan Kesehatan masyarakat	216.726.727.864	216.726.727.864	216.726.727.864	216.726.727.864	216.726.727.864	211.231.263.968	KSD Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; Tagging Penurunan Kemiskinan
1.02.02.1.02.17	Pengelolaan surveilans Kesehatan	176.149.400	176.149.400	176.149.400	176.149.400	176.149.400	176.149.400	
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM Bidang Kesehatan lintas kabupaten/kota	245.013.000	245.013.000	245.013.000	245.013.000	245.013.000	245.013.000	
1.02.02.1.02.19	Pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan Kesehatan	367.251.000	367.251.000	367.251.000	367.251.000	367.251.000	340.389.000	
1.02.02.1.02.20	Verifikasi dan penilaian kelayakan Puskesmas untuk registrasi Puskesmas	30.528.000	30.528.000	30.528.000	30.528.000	30.528.000	30.528.000	
1.02.02.1.02.21	Investigasi lanjutan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal oleh kabupaten/kota	103.387.800	103.387.800	103.387.800	103.387.800	103.387.800	92.725.050	
1.02.02.1.02.22	Operasional pelayanan rumah sakit	5.690.887.837	5.690.887.837	5.690.887.837	5.690.887.837	5.690.887.837	5.685.095.929	UPTD. RS Khusus Mata
1.02.02.1.02.22	Operasional pelayanan rumah sakit	7.226.721.380	7.226.721.380	7.226.721.380	7.226.721.380	7.226.721.380	7.188.943.049	UPTD. RS Khusus Paru
1.02.02.1.02.22	Operasional pelayanan rumah sakit	5.653.861.989	5.653.861.989	5.653.861.989	5.653.861.989	5.653.861.989	5.564.723.777	UPTD. RSU Kusta Lau Simomo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Pergeseran 1 (Rp.)	Pagu Pergeseran 2 (Rp.)	Pagu Pergeseran 3 (Rp.)	Pagu Pergeseran 4 (Rp.)	P-Renja (Rp.)	Ket.
1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3.398.572.065	3.398.572.065	3.398.572.065	3.398.572.065	3.398.572.065	3.398.572.065	Terdapat belanja hibah uang untuk PMI sebesar 2,5 Miliar
1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit potensial KLB ke lab rujukan/nasional	38.400.000	38.400.000	38.400.000	38.400.000	38.400.000	38.400.000	
1.02.02.1.02.26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	161.098.000	161.098.000	161.098.000	161.098.000	161.098.000	161.098.000	
1.02.02.1.02.27	Pendampingan fasilitas pelayanan Kesehatan	439.485.600	439.485.600	439.485.600	439.485.600	439.485.600	352.035.000	
1.02.02.1.03	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</i>	726.888.698	726.888.698	726.888.698	726.888.698	726.888.698	661.563.578	
1.02.02.1.03.01	Pengelolaan data dan informasi Kesehatan	361.164.000	361.164.000	361.164.000	361.164.000	361.164.000	289.710.000	
1.02.02.1.03.02	Pengelolaan sistem informasi Kesehatan	365.724.698	365.724.698	365.724.698	365.724.698	365.724.698	371.853.578	
1.02.02.1.04	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</i>	1.346.241.600	1.346.241.600	1.346.241.600	1.346.241.600	1.346.241.600	1.098.086.600	
1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan Kesehatan	265.253.000	265.253.000	265.253.000	265.253.000	265.253.000	265.253.000	
1.02.02.1.04.02	Peningkatan tata Kelola rumah sakit	360.481.600	360.481.600	360.481.600	360.481.600	360.481.600	360.481.600	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas Kesehatan	420.507.000	420.507.000	420.507.000	420.507.000	420.507.000	172.352.000	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas Kesehatan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	UPTD. RS Khusus Mata
1.02.02.1.04.03	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas Kesehatan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	UPTD. RSU Kusta Lau Simomo
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.858.443.054	10.858.443.054	10.858.443.054	10.858.443.054	10.858.443.054	8.620.739.054	
1.02.03.1.01	<i>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</i>	6.960.741.400	6.960.741.400	6.960.741.400	6.960.741.400	6.960.741.400	4.985.119.400	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia Kesehatan	4.307.218.000	4.307.218.000	4.307.218.000	4.307.218.000	4.307.218.000	2.842.218.000	Tagging Penanganan COVID-19
1.02.03.1.01.02	Distribusi dan pemerataan sumber daya manusia Kesehatan	2.653.535.400	2.653.535.400	2.653.535.400	2.653.535.400	2.653.535.400	2.142.901.400	Dokter Terbang
1.02.03.1.02	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</i>	3.897.701.654	3.897.701.654	3.897.701.654	3.897.701.654	3.897.701.654	3.635.619.654	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia Kesehatan	2.910.257.654	2.910.257.654	2.910.257.654	2.910.257.654	2.910.257.654	2.910.257.654	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Pergeseran 1 (Rp.)	Pagu Pergeseran 2 (Rp.)	Pagu Pergeseran 3 (Rp.)	Pagu Pergeseran 4 (Rp.)	P-Renja (Rp.)	Ket.
1.02.03.1.02.01	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia Kesehatan	987.444.000	987.444.000	987.444.000	987.444.000	987.444.000	698.500.000	UPT. Pelatihan Kesehatan
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kesehatan	0	0	0	0	0	26.862.000	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	445.206.621	445.206.621	445.206.621	445.206.621	445.206.621	445.206.621	
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	322.265.900	322.265.900	322.265.900	322.265.900	322.265.900	322.265.900	
1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	322.265.900	322.265.900	322.265.900	322.265.900	322.265.900	322.265.900	
1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	122.940.721	122.940.721	122.940.721	122.940.721	122.940.721	122.940.721	
1.02.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	122.940.721	122.940.721	122.940.721	122.940.721	122.940.721	122.940.721	
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.130.257.300	3.130.257.300	3.130.257.300	3.130.257.300	3.130.257.300	2.786.308.200	
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	887.645.800	887.645.800	887.645.800	887.645.800	887.645.800	709.395.800	
1.02.05.1.01.01	Peningkatan upaya advokasi Kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah Provinsi	887.645.800	887.645.800	887.645.800	887.645.800	887.645.800	709.395.800	
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.951.118.000	1.951.118.000	1.951.118.000	1.951.118.000	1.951.118.000	1.951.118.000	
1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan promosi Kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	1.951.118.000	1.951.118.000	1.951.118.000	1.951.118.000	1.951.118.000	1.951.118.000	
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	291.493.500	291.493.500	291.493.500	291.493.500	291.493.500	125.794.400	
1.02.05.1.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi UKBM	291.493.500	291.493.500	291.493.500	291.493.500	291.493.500	125.794.400	
Jumlah		484.096.770.434	484.096.770.434	488.094.719.434	488.094.719.434	488.094.719.434	473.656.879.256	

BAB IV PENUTUP

P.Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 disusun melalui berbagai tahapan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

P.Renja PD ini juga disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis Nasional dan prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2023, isu-isu strategis daerah, serta tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2017, serta nomenklatur program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam penyusunannya, diperhatikan prinsip-prinsip yang menjamin keserasian, efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana yang tersedia.

P.Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Kita berharap, program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam P.Renja PD ini dapat berkontribusi dalam pencapaian visi ***Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat*** serta misi ***Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki kesehatan yang prima.***

Medan, Juli 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara,



dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19651119 199903 1 001

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN										Formulir									
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																			
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023										RKPA-BELANJA SKPD									

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T -1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T +1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				461,715,414,287	22,381,356,147	0	0	484,096,770,434	448,901,904,890	24,754,974,366	0	0	473,656,879,256	(10.439.891.178)		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				159,158,321,794	11,874,373,558	0	0	171,032,695,352	158,863,256,295	14,723,390,058	0	0	173,586,646,353	2.553.951.001		
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,056,652,045	0	0	0	1,056,652,045	958,259,322	0	0	0	958,259,322	(98.392.723)		
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			435,335,595	0	0	0	435,335,595	421,338,595	0	0	0	421,338,595	(13.997.000)		
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,884,950	0	0	0	18,884,950	18,884,950	0	0	0	18,884,950	0		
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,578,000	0	0	0	40,578,000	66,728,000	0	0	0	66,728,000	26.150.000		
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,584,850	0	0	0	13,584,850	13,584,850	0	0	0	13,584,850	0		
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			43,082,850	0	0	0	43,082,850	66,878,127	0	0	0	66,878,127	23.795.277		
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,324,000	0	0	0	36,324,000	36,324,000	0	0	0	36,324,000	0		
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			468,861,800	0	0	0	468,861,800	334,520,800	0	0	0	334,520,800	(134.341.000)		
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				126,196,619,400	0	0	0	126,196,619,400	126,178,178,200	0	0	0	126,178,178,200	(18.441.200)		
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			123,885,047,000	0	0	0	123,885,047,000	123,885,047,000	0	0	0	123,885,047,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T - 1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			92,040,000	0	0	0	92,040,000	76,680,000	0	0	0	76,680,000	(15.360.000)	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			807,240,000	0	0	0	807,240,000	538,680,000	0	0	0	538,680,000	(268.560.000)	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPT. Pelatihan Kesehatan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			78,120,000	0	0	0	78,120,000	53,700,000	0	0	0	53,700,000	(24.420.000)	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			88,680,000	0	0	0	88,680,000	65,880,000	0	0	0	65,880,000	(22.800.000)	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			866,610,000	0	0	0	866,610,000	1,202,775,000	0	0	0	1,202,775,000	336.165.000	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99,720,000	0	0	0	99,720,000	89,100,000	0	0	0	89,100,000	(10.620.000)	
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			148,684,400	0	0	0	148,684,400	132,087,200	0	0	0	132,087,200	(16.597.200)	
1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,527,000	0	0	0	27,527,000	19,095,000	0	0	0	19,095,000	(8.432.000)	
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,025,000	0	0	0	14,025,000	14,025,000	0	0	0	14,025,000	0	
1	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,660,000	0	0	0	35,660,000	51,751,000	0	0	0	51,751,000	16.091.000	
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			53,266,000	0	0	0	53,266,000	49,358,000	0	0	0	49,358,000	(3.908.000)	
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				310,985,000	0	0	0	310,985,000	38,585,000	0	0	0	38,585,000	(272.400.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,975,000	0	0	0	3,975,000	3,975,000	0	0	0	3,975,000	0	
1	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,880,000	0	0	0	5,880,000	5,880,000	0	0	0	5,880,000	0	
1	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,760,000	0	0	0	11,760,000	11,760,000	0	0	0	11,760,000	0	
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,970,000	0	0	0	16,970,000	16,970,000	0	0	0	16,970,000	0	
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			272,400,000	0	0	0	272,400,000	0	0	0	0	0	(272.400.000)	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				587,736,000	0	0	0	587,736,000	587,736,000	0	0	0	587,736,000	0	
1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,730,000	0	0	0	11,730,000	11,730,000	0	0	0	11,730,000	0	
1	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			43,410,000	0	0	0	43,410,000	43,410,000	0	0	0	43,410,000	0	
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,274,000	0	0	0	20,274,000	20,274,000	0	0	0	20,274,000	0	
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			463,194,000	0	0	0	463,194,000	463,194,000	0	0	0	463,194,000	0	
1	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,128,000	0	0	0	49,128,000	49,128,000	0	0	0	49,128,000	0	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				5,396,281,995	56,711,426	0	0	5,452,993,421	5,388,942,907	43,711,426	0	0	5,432,654,333	(20.339.088)	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			79,511,350	0	0	0	79,511,350	79,511,350	0	0	0	79,511,350	0	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90,977,049	1,687,140	0	0	92,664,189	90,977,049	1,687,140	0	0	92,664,189	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T - 1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Bangunan Kantor (Dinas Kesehatan)															
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,852,002	0	0	0	60,852,002	60,852,002	0	0	0	60,852,002	0	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,410,853	0	0	0	55,410,853	55,410,853	0	0	0	55,410,853	0	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,686,920	0	0	0	49,686,920	49,686,920	0	0	0	49,686,920	0	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,727,380	0	0	0	36,727,380	36,727,380	0	0	0	36,727,380	0	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70,702,172	0	0	0	70,702,172	69,068,222	0	0	0	69,068,222	(1.633.950)	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			394,054,269	0	0	0	394,054,269	394,054,269	0	0	0	394,054,269	0	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			115,443,725	0	0	0	115,443,725	115,443,725	0	0	0	115,443,725	0	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			95,252,831	0	0	0	95,252,831	95,252,831	0	0	0	95,252,831	0	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			63,340,205	0	0	0	63,340,205	63,340,205	0	0	0	63,340,205	0	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			84,999,456	0	0	0	84,999,456	84,999,456	0	0	0	84,999,456	0	
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH			132,549,369	42,024,286	0	0	174,573,655	132,549,369	42,024,286	0	0	174,573,655	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T - 1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(UPT. Pelatihan Kesehatan)	(PAD)														
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			106,735,155	0	0	0	106,735,155	106,735,155	0	0	0	106,735,155	0	
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			135,955,289	0	0	0	135,955,289	135,955,289	0	0	0	135,955,289	0	
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			84,531,765	0	0	0	84,531,765	84,531,765	0	0	0	84,531,765	0	
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			119,971,710	0	0	0	119,971,710	119,971,710	0	0	0	119,971,710	0	
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			131,190,170	0	0	0	131,190,170	131,189,272	0	0	0	131,189,272	(898)	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			79,944,825	0	0	0	79,944,825	79,944,825	0	0	0	79,944,825	0	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			101,428,500	0	0	0	101,428,500	101,428,500	0	0	0	101,428,500	0	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,297,500	0	0	0	50,297,500	50,297,500	0	0	0	50,297,500	0	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			202,279,400	0	0	0	202,279,400	202,279,400	0	0	0	202,279,400	0	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			186,740,200	0	0	0	186,740,200	186,733,460	0	0	0	186,733,460	(6.740)	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33,925,400	0	0	0	33,925,400	33,925,400	0	0	0	33,925,400	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T - 1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T +1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,400,000	0	0	0	14,400,000	14,400,000	0	0	0	14,400,000	0	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,752,000	0	0	0	55,752,000	55,752,000	0	0	0	55,752,000	0	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,924,000	0	0	0	14,924,000	14,924,000	0	0	0	14,924,000	0	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (UPT. Pelatihan Kesehatan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,197,500	13,000,000	0	0	17,197,500	0	0	0	0	0	(17.197.500)	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,060,000	0	0	0	10,060,000	10,060,000	0	0	0	10,060,000	0	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,058,000	0	0	0	10,058,000	10,058,000	0	0	0	10,058,000	0	
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			356,160,000	0	0	0	356,160,000	356,160,000	0	0	0	356,160,000	0	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,089,964,000	0	0	0	2,089,964,000	2,089,964,000	0	0	0	2,089,964,000	0	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			56,910,000	0	0	0	56,910,000	56,910,000	0	0	0	56,910,000	0	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			61,920,000	0	0	0	61,920,000	61,920,000	0	0	0	61,920,000	0	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			46,829,000	0	0	0	46,829,000	46,829,000	0	0	0	46,829,000	0	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	0	0	0	45,000,000	43,500,000	0	0	0	43,500,000	(1.500.000)	
1	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,600,000	0	0	0	27,600,000	27,600,000	0	0	0	27,600,000	0	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				104,094,246	10,820,412,132	0	0	10,924,506,378	104,094,246	10,707,622,632	0	0	10,811,716,878	(112.789.500)	
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	7,084,559,034	0	0	7,084,559,034	0	7,050,559,034	0	0	7,050,559,034	(34.000.000)	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	556,205,744	0	0	556,205,744	0	535,756,744	0	0	535,756,744	(20.449.000)	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	131,116,950	0	0	131,116,950	0	131,116,950	0	0	131,116,950	0	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	790,322,600	0	0	790,322,600	0	790,322,600	0	0	790,322,600	0	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	289,169,697	0	0	289,169,697	0	283,094,735	0	0	283,094,735	(6.074.962)	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			102,475,000	414,005,122	0	0	516,480,122	102,475,000	414,005,122	0	0	516,480,122	0	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,619,246	61,504,220	0	0	63,123,466	1,619,246	61,504,220	0	0	63,123,466	0	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	146,073,945	0	0	146,073,945	0	146,073,945	0	0	146,073,945	0	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	78,102,660	0	0	78,102,660	0	78,102,660	0	0	78,102,660	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T - 1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	320,177,705	0	0	320,177,705	0	320,177,705	0	0	320,177,705	0	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	825,510,332	0	0	825,510,332	0	824,567,118	0	0	824,567,118	(943.214)	
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	123,664,123	0	0	123,664,123	0	72,341,799	0	0	72,341,799	(51.322.324)	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20,000,946,460	0	0	0	20,000,946,460	19,320,960,972	0	0	0	19,320,960,972	(679.985.488)	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29,600,000	0	0	0	29,600,000	29,600,000	0	0	0	29,600,000	0	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			990,000	0	0	0	990,000	990,000	0	0	0	990,000	0	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,170,000	0	0	0	6,170,000	6,170,000	0	0	0	6,170,000	0	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			700,000,000	0	0	0	700,000,000	695,000,000	0	0	0	695,000,000	(5.000.000)	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			511,000,000	0	0	0	511,000,000	461,000,000	0	0	0	461,000,000	(50.000.000)	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	PENDAPATAN ASLI DAERAH			310,000,000	0	0	0	310,000,000	348,000,000	0	0	0	348,000,000	38.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Daya Air dan Listrik (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	(PAD)														
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	0	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,850,000,000	0	0	0	1,850,000,000	1,850,000,000	0	0	0	1,850,000,000	0	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000	0	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			986,300,528	0	0	0	986,300,528	1,050,192,272	0	0	0	1,050,192,272	63.891.744	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			268,821,252	0	0	0	268,821,252	285,321,104	0	0	0	285,321,104	16.499.852	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			706,753,960	0	0	0	706,753,960	752,953,274	0	0	0	752,953,274	46.199.314	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			418,407,392	0	0	0	418,407,392	441,507,126	0	0	0	441,507,126	23.099.734	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,228,796,796	0	0	0	13,228,796,796	12,400,463,472	0	0	0	12,400,463,472	(828.333.324)	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			356,706,532	0	0	0	356,706,532	372,363,724	0	0	0	372,363,724	15.657.192	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5,505,006,648	997,250,000	0	0	6,502,256,648	6,286,499,648	3,972,056,000	0	0	10,258,555,648	3.756.299.000	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33,470,000	0	0	0	33,470,000	33,470,000	0	0	0	33,470,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPT. Pelatihan Kesehatan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,470,000	0	0	0	33,470,000	33,470,000	0	0	0	33,470,000	0	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,470,000	0	0	0	33,470,000	33,470,000	0	0	0	33,470,000	0	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33,470,000	0	0	0	33,470,000	33,470,000	0	0	0	33,470,000	0	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			230,520,000	0	0	0	230,520,000	230,520,000	0	0	0	230,520,000	0	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33,470,000	0	0	0	33,470,000	33,470,000	0	0	0	33,470,000	0	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			66,940,000	0	0	0	66,940,000	66,940,000	0	0	0	66,940,000	0	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			776,300,000	0	0	0	776,300,000	776,300,000	0	0	0	776,300,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T - 1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T +1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Lapangan (Dinas Kesehatan)															
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			66,940,000	0	0	0	66,940,000	66,940,000	0	0	0	66,940,000	0	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			66,940,000	0	0	0	66,940,000	66,940,000	0	0	0	66,940,000	0	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			66,940,000	0	0	0	66,940,000	66,940,000	0	0	0	66,940,000	0	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			66,940,000	0	0	0	66,940,000	66,940,000	0	0	0	66,940,000	0	
1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			73,246,598	0	0	0	73,246,598	73,246,598	0	0	0	73,246,598	0	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			257,049,000	0	0	0	257,049,000	257,049,000	0	0	0	257,049,000	0	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			86,700,000	0	0	0	86,700,000	86,700,000	0	0	0	86,700,000	0	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			115,300,000	0	0	0	115,300,000	91,800,000	0	0	0	91,800,000	(23.500.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)															
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			594,695,000	0	0	0	594,695,000	594,695,000	0	0	0	594,695,000	0	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,000,000	0	0	0	110,000,000	110,000,000	0	0	0	110,000,000	0	
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,114,517,500	20,000,000	0	0	1,134,517,500	1,114,517,500	20,000,000	0	0	1,134,517,500	0	
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			480,648,550	0	0	0	480,648,550	1,525,391,550	2,974,806,000	0	0	4,500,197,550	4.019.549.000	
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			887,500,000	977,250,000	0	0	1,864,750,000	647,750,000	977,250,000	0	0	1,625,000,000	(239.750.000)	
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			228,680,000	0	0	0	228,680,000	228,680,000	0	0	0	228,680,000	0	
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT. Pelatihan Kesehatan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			37,800,000	0	0	0	37,800,000	37,800,000	0	0	0	37,800,000	0	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				288,123,185,518	10,506,982,589	0	0	298,630,168,107	278,186,394,720	10,031,584,308	0	0	288,217,979,028	(10.412.189.079)	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				25,701,707,495	3,516,522,485	0	0	29,218,229,980	24,754,511,548	3,225,841,655	0	0	27,980,353,203	(1.237.876.777)	
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,955,107,400	0	0	0	3,955,107,400	3,955,107,400	0	0	0	3,955,107,400	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T +1
								T -1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			324,085,218	0	0	0	324,085,218	221,320,000	0	0	0	221,320,000	(102.765.218)		
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			273,700,528	0	0	0	273,700,528	273,700,528	0	0	0	273,700,528	0		
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			488,120,221	0	0	0	488,120,221	488,120,221	0	0	0	488,120,221	0		
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	111,125,161	0	0	111,125,161	0	0	0	0	0	(111.125.161)		
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33,132,750	0	0	0	33,132,750	33,132,750	0	0	0	33,132,750	0		
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,132,538	1,123,860,366	0	0	1,130,992,904	7,132,538	1,110,483,774	0	0	1,117,616,312	(13.376.592)		
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,335,924,585	2,281,536,958	0	0	7,617,461,543	4,582,624,892	2,115,357,881	0	0	6,697,982,773	(919.478.770)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T - 1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			131,121,000	0	0	0	131,121,000	131,121,000	0	0	0	131,121,000	0	
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			136,800,700	0	0	0	136,800,700	136,800,700	0	0	0	136,800,700	0	
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,016,582,555	0	0	0	15,016,582,555	14,925,451,519	0	0	0	14,925,451,519	(91.131.036)	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				260,348,347,725	6,990,460,104	0	0	267,338,807,829	251,672,232,994	6,805,742,653	0	0	258,477,975,647	(8.860.832.182)	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			682,017,189	0	0	0	682,017,189	682,017,189	0	0	0	682,017,189	0	
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			7,925,702,686	0	0	0	7,925,702,686	5,435,869,476	0	0	0	5,435,869,476	(2.489.833.210)	
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			1,886,400,200	0	0	0	1,886,400,200	1,701,349,200	0	0	0	1,701,349,200	(185.051.000)	
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			265,133,000	0	0	0	265,133,000	103,695,000	0	0	0	103,695,000	(161.438.000)	
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			276,641,500	0	0	0	276,641,500	271,141,500	0	0	0	271,141,500	(5.500.000)	
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non			6,865,877,000	0	0	0	6,865,877,000	6,808,441,880	0	0	0	6,808,441,880	(57.435.120)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T - 1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
						Fisik-BOKKB-BOK														
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			521,542,000	0	0	0	521,542,000	445,330,000	0	0	0	445,330,000	(76.212.000)	
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			748,349,840	0	0	0	748,349,840	748,349,840	0	0	0	748,349,840	0	
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			2,425,840,900	0	0	0	2,425,840,900	2,417,185,900	0	0	0	2,417,185,900	(8.655.000)	
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			131,669,400	0	0	0	131,669,400	131,669,400	0	0	0	131,669,400	0	
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			4,678,137,839	0	0	0	4,678,137,839	4,654,031,684	0	0	0	4,654,031,684	(24.106.155)	
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			79,058,000	0	0	0	79,058,000	79,058,000	0	0	0	79,058,000	0	
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			387,546,340	0	0	0	387,546,340	387,546,340	0	0	0	387,546,340	0	
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			206,808,000	0	0	0	206,808,000	107,354,000	0	0	0	107,354,000	(99.454.000)	
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			216,726,727,864	0	0	0	216,726,727,864	211,231,263,968	0	0	0	211,231,263,968	(5.495.463.896)	
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			176,149,400	0	0	0	176,149,400	176,149,400	0	0	0	176,149,400	0	
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			245,013,000	0	0	0	245,013,000	245,013,000	0	0	0	245,013,000	0	

<https://sumutprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?LOEaXR9wWaXuv6O8BWnF0aqwhuzpak9sASL5jnxUHRQ2VKve2LooRfS1unburopjRggmNB099FXURteA3QharAbPWPfX6jYuJf8J/XPTfqzcv40OJlqHwMm6...> 16/19

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T - 1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T +1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Provinsi															
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			265,253,000	0	0	0	265,253,000	265,253,000	0	0	0	265,253,000	0	
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			360,481,600	0	0	0	360,481,600	360,481,600	0	0	0	360,481,600	0	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			420,507,000	0	0	0	420,507,000	172,352,000	0	0	0	172,352,000	(248.155.000)	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				10,858,443,054	0	0	0	10,858,443,054	8,620,739,054	0	0	0	8,620,739,054	(2.237.704.000)	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				6,960,741,400	0	0	0	6,960,741,400	4,985,119,400	0	0	0	4,985,119,400	(1.975.622.000)	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,307,218,000	0	0	0	4,307,218,000	2,842,218,000	0	0	0	2,842,218,000	(1.465.000.000)	
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,653,523,400	0	0	0	2,653,523,400	2,142,901,400	0	0	0	2,142,901,400	(510.622.000)	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				3,897,701,654	0	0	0	3,897,701,654	3,635,619,654	0	0	0	3,635,619,654	(262.082.000)	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			987,444,000	0	0	0	987,444,000	698,500,000	0	0	0	698,500,000	(288.944.000)	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non			2,910,257,654	0	0	0	2,910,257,654	2,910,257,654	0	0	0	2,910,257,654	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T - 1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
						Fisik-BOKKB-BOK														
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	0	0	0	0	26,862,000	0	0	0	26,862,000	26.862.000	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				445,206,621	0	0	0	445,206,621	445,206,621	0	0	0	445,206,621	0	
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				322,265,900	0	0	0	322,265,900	322,265,900	0	0	0	322,265,900	0	
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			322,265,900	0	0	0	322,265,900	322,265,900	0	0	0	322,265,900	0	
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)				122,940,721	0	0	0	122,940,721	122,940,721	0	0	0	122,940,721	0	
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			122,940,721	0	0	0	122,940,721	122,940,721	0	0	0	122,940,721	0	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				3,130,257,300	0	0	0	3,130,257,300	2,786,308,200	0	0	0	2,786,308,200	(343.949.100)	
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				887,645,800	0	0	0	887,645,800	709,395,800	0	0	0	709,395,800	(178.250.000)	
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			887,645,800	0	0	0	887,645,800	709,395,800	0	0	0	709,395,800	(178.250.000)	
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi				1,951,118,000	0	0	0	1,951,118,000	1,951,118,000	0	0	0	1,951,118,000	0	
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,951,118,000	0	0	0	1,951,118,000	1,951,118,000	0	0	0	1,951,118,000	0	
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi				291,493,500	0	0	0	291,493,500	125,794,400	0	0	0	125,794,400	(165.699.100)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			291,493,500	0	0	0	291,493,500	125,794,400	0	0	0	125,794,400	(165.699.100)	

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKA DAERAH LINGKUP PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2023

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Daerah Provinsi Tahun 2023	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8 + 12	14 = 13/5 x 100%	15				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		Umur Harapan Hidup (UHH)	69,5	69,61	69,50	69,61	69,61	69,61		69,61			100,16				
1	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak		Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	67,39	47,06	67,39	16,86	25,83	25,83		25,83			100,00				
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	2,22	2,19	2,22	0,46	1,69	1,69		1,69			100,00				
2	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat		Persentase Balita Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	26,50%	21,00%	26,50%	21,10%	21,10%	21,10%		21,10%			120,75				
3	Menurunnya Angka Kesakitan		Angka Kesakitan (Morbiditas)	12,20%	12,98%	12,20%	12,98%	12,98%	12,98%		12,98%			90,16				
		BELANJA					488.063.528.434	15,96	77.872.930.973	30,15	147.156.897.058	46,11	225.029.828.029	46,11	46,11			
		URUSAN WAJIB																
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					174.999.451.352	0,00	16.627.037.047	87,00	70.277.272.982	87,00	86.904.310.029	87,00	49,66			
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		66	53	66	1.056.652.045	5	75.934.950	4	412.467.545	5	481.538.495	58,00	481.538.495	87,88%	45,57	Dinkes Provsu
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Outcome :															
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Tersusun	66	53	66	435.335.595	5	53.879.350	4	158.477.788	9	212.357.138	62	212.357.138	93,94%	48,78	
			Output:	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		21	5	5	5	5		5							
					dok	Dok	Dok	Dok	Dok		Dok							
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Outcome :															
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Tersusun	66	53	66	18.884.950	5	6.864.000			5	58		87,88%	0,00	Dinkes Provsu	
					Dok	Dok	Dok	Dok	Dok		Dok		Dok					
			Output:															
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		21	5	5	5	5		5		26		100%			
					Dok	Dok	Dok	Dok	Dok		Dok		Dok					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Outcome :															
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Tersusun	66	53	66	40.578.000	5	12.541.600	1.186.400		5	13.728.000	58	13.728.000	87,88%	33,83	Dinkes Provsu
					Dok	Dok	Dok	Dok	Dok		Dok		Dok					
			Output:															
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		21	5	5	5	5		5		26		100%			
					Dok	Dok	Dok	Dok	Dok		Dok		Dok					
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Outcome :							-		5	58		87,88%	0,00	Dinkes Provsu	
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Tersusun	66	53	66	13.584.850	5				5	26		100%			
			Output:															
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		21	5	5	5	5		5		26		100%			
					Dok	Dok	Dok	Dok	Dok		Dok		Dok					
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Outcome :															
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Tersusun	66	53	66	43.082.850	5		25.082.850		5	25.082.850	58	25.082.850	87,88%	58,22	Dinkes Provsu
					Dok	Dok	Dok	Dok	Dok		Dok		Dok					
			Output:															
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		21	5	5	5	5		5		26		100%			
					Dok	Dok	Dok	Dok	Dok		Dok		Dok					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Outcome :															
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Tersusun	66	53	13	36.324.000	5		15.000.000		5	15.000.000	58	15.000.000	87,88%	41,30	Dinkes Provsu
					Dok	Dok	Dok	Dok	Dok		Dok		Dok					
			Output:															

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			32	8	5							5	37		62,50%			
						Dok	Dok	Dok							Dok	Dok					
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Outcome :	66	53	66	468.861.800	5	2.650.000	212.720.507				5	215.370.507	58	215.370.507	87,88%	45,93	Dinkes Provsu
					Dok	Dok	Dok		Dok						Dok	Dok					
				Output:																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32	8	5							5	37		62,50%			
						Dok	Dok	Dok							Dok	Dok					
2			Administrasi keuangan Perangkat Daerah		15	12	15	126.196.619.400	1	11.710.136.916	57.832.712.628				1	69.542.849.544	13		86,67%	55,11	
					Dok	Dok	Dok		Dok						Dok	Dok					
			Penyediaan Gai dan Tunjangan ASN	Outcome :																Dinkes Provsu	
			Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia		15	12	15	123.885.047.000	1	11.581.976.916	56.865.242.628				1	68.447.219.544	13		86,67%	55,25	
					Dok	Dok	Dok		Dok						Dok	Dok					
				Output:																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				950	950							950	950		100%			
							Orang	Orang							Orang	Orang					
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Outcome :																	
			Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia		15	12	15	2.032.410.000	1	123.800.000	964.470.000				1	1.088.270.000	13		86,67%	53,55	Dinkes Provsu
					Dok	Dok	Dok		Dok						Dok	Dok					
				Output:																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4														
							Unit														
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Outcome :																	
			Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia		15	12	15	148.684.400	1						1	13		86,67%	0,00	Dinkes Provsu	
					Dok	Dok	Dok		Dok						Dok	Dok					
				Output:																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12	3		3					6						
							Bulan	Bulan		Bulan					Bulan						
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Outcome :																	
			Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia		15	12	15	27.527.000	1						1	13		86,67%	0,00	Dinkes Provsu	
					Dok	Dok	Dok		Dok						Dok	Dok					
				Output:																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1	1							1	1		100%			
							Dok	Dok							Dok	Dok					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Outcome :																	
			Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia		15	12	15	14.025.000	1						1	13		86,67%	0,00	Dinkes Provsu	
					Dok	Dok	Dok		Dok						Dok	Dok					
				Output:																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1	1							1	1		100%			
							Dok	Dok							Dok	Dok					
			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggaapn Pemeriksaan	Outcome :																	
			Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia		15	12	15	35.660.000	1						1	13		86,67%	0,00	Dinkes Provsu	
					Dok	Dok	Dok		Dok						Dok	Dok					
				Output:																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1	1							1	1		100%			
							Dok	Dok							Dok	Dok					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Outcome :																	
			Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia		15	12	15	53.266.000	1	4.360.000	3.000.000				1	7.360.000	13		86,67%	13,82	Dinkes Provsu
					Dok	Dok	Dok		Dok						Dok	Dok					
				Output:																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1	1							1	1					
							Dok	Dok							Dok	Dok					
3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		25	20	25	310.985.000	2	-	1				3	23		92,00%	0,00	Dinkes Provsu	
					Dok	Dok	Dok		Dok		Dok				Dok	Dok					
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Outcome :	25	20	25	3.975.000	2		1				3	23		92,00%	0,00	Dinkes Provsu	
			Jumlah Dokumen Aset (Inventarisasi Barang)																		
					Dok	Dok	Dok		Dok		Dok				Dok	Dok					

			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD				1	1	1							2	2		200%		
						Dok		Dok	Dok							Dok	Dok				
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milk Daerah SKPD	Outcome :																		
			Jumlah Dokumen Aset (Inventarisasi Barang)	25	20	25	5.880.000	2	1							3	23		92,00%	0,00	Dinkes Provsu
				Dok	Dok	Dok		Dok	Dok							Dok	Dok				
			Output:																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah SKPD			1		1	1	1						2	2		200%		
						Dok		Dok	Dok	Dok						Dok	Dok				
		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milk Daerah pada SKPD	Outcome :																		
			Jumlah Dokumen Aset (Inventarisasi Barang)	25	20	25	11.760.000	2	1							3	23		92,00%	0,00	Dinkes Provsu
				Dok	Dok	Dok		Dok	Dok							Dok	Dok				
			Output:																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milk Daerah pada SKPD			1															
						Dok															
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD	Outcome :																		
			Jumlah Dokumen Aset (Inventarisasi Barang)	25	20	25	16.970.000	2	1							3	23		92,00%	0,00	Dinkes Provsu
				Dok	Dok	Dok		Dok	Dok							Dok	Dok				
			Output:																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD			1															
						Dok															
		Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	Outcome :																		
			Jumlah Dokumen Aset (Inventarisasi Barang)	25	20	25	272.400.000	2	1							3	23		92,00%	0,00	Dinkes Provsu
				Dok	Dok	Dok		Dok	Dok							Dok	Dok				
			Output:																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD			1															
						Dok															
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5	4	5	587.736.000		36.384.880	1	72.843.863					1	109.228.743	5	100,00%	18,58	Dinkes Provsu
			Dok	Dok	Dok				Dok							Dok	Dok				
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Outcome :																		
			Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Disusun			1	11.730.000		1							1					Dinkes Provsu
						Dok			Dok							Dok					
			Output:																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1			1							1					
						Dok			Dok							Dok					
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Outcome :																		
			Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Disusun	5	4	5	43.410.000		1							1	5		100,00%	0,00	Dinkes Provsu
				Dok	Dok	Dok			Dok							Dok	Dok				
			Output:																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			1			1							1					
						Dok			Dok							Dok					
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Outcome :																		
			Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Disusun	5	4	5	20.274.000		1							1	5		100,00%	0,00	Dinkes Provsu
				Dok	Dok	Dok			Dok							Dok	Dok				
			Output:																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1			1							1					
						Dok			Dok							Dok					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Outcome :																		
			Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Disusun	5	4	5	463.194.000		36.384.880	1	72.843.863					1	109.228.743	5	100,00%	23,58	Dinkes Provsu
				Dok	Dok	Dok			Dok							Dok	Dok				
			Output:																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			200															
						Orang															
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Outcome :																		
			Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Disusun	5	4	5	49.128.000		1							1	5		100,00%	0,00	Dinkes Provsu
				Dok	Dok	Dok			Dok							Dok	Dok				
			Output:																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			300															
						Orang															
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah		5	4	5	5.452.993.421		919.070.190	1	2.626.162.859					1	3.545.233.040	5	100,00%	65,01	Dinkes Provsu
				Dok	Dok	Dok			Dok							Dok	Dok				

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome :	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	5 Dok	4 Dok	5 Dok	374.852.694		1 Dok	356.331.450	5 Dok			Dinkes Provisu
			Output:	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1								
				Paket											
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Outcome :	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	5 Dok	4 Dok	5 Dok	823.792.658	1.633.700	1 Dok	674.745.500	5 Dok	100,00%	82,11	Dinkes Provisu
			Output:	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1								
				Paket											
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Outcome :	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	5 Dok	4 Dok	5 Dok	752.957.744	10.428.000	1 Dok	521.470.100	5 Dok	100,00%	70,64	Dinkes Provisu
			Output:	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1								
				Paket											
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Outcome :	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	5 Dok	4 Dok	5 Dok	654.615.825	75.025.000	1 Dok	219.898.790	5 Dok	100,00%	45,05	Dinkes Provisu
			Output:	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan			1								
				Paket											
		Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Outcome :	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	5 Dok	4 Dok	5 Dok	122.391.500	12.142.000	1 Dok	20.628.500	5 Dok	100,00%	26,78	Dinkes Provisu
			Output:	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1								
				Dok											
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Outcome :	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	5 Dok	4 Dok	5 Dok	356.160.000	113.385.000	1 Dok	136.475.000	5 Dok	100,00%	70,15	Dinkes Provisu
			Output:	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			1								
				Lap											
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Outcome :	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	5 Dok	4 Dok	5 Dok	2.340.623.000	706.456.490	1 Dok	696.613.510	5 Dok	100,00%	59,94	Dinkes Provisu
			Output:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1								
				Lap											
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Outcome :	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	5 Dok	4 Dok	5 Dok	27.600.000		1 Dok		5 Dok	100,00%	0,00	Dinkes Provisu
			Output:	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1								
				Dok											
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		100%	100%	10.924.506.378	-	50%	2.124.227.143	50%	50,00%	19,44	Dinkes Provisu
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Outcome :	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah	100%		100%	7.084.559.034		50%		50%	50,00%	0,00	Dinkes Provisu
			Output:	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2								
				Unit											
		Pengadaan Mebel	Outcome :	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah	100%		100%	1.766.814.991		50%	944.140.000	50%	50,00%	53,44	Dinkes Provisu
			Output:	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1								
				Paket											
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Outcome :	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah	100%		100%	1.949.468.230		50%	1.108.527.143	50%	50,00%	56,86	Dinkes Provisu

[illegible]

			Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	Dok	Dok	Dok	266.480.000			Dok	406.503.000			Dok	406.503.000	Dok		100,00%	152,55	Dinkes Provsu
			Output:																	
			Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia			1														
						Dok														
Rata-rata capaian kinerja (%)							174.999.451.352		16.627.037.047	87,00	70.277.272.982		-	87,00	86.904.310.029	87,00	86.904.310.029	87,00	49,66	
Predikat kinerja																				
II		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					298.630.168.107	16,95	58.991.237.752	62,26	75.071.737.235			62,26	134.062.994.987	62,26		62,26	44,89	
1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1	29.218.229.980			-		10.494.611.223				10.494.611.223					Dinkes Provsu
					Dok						10.494.611.223									
		Pengembangan Pendekatan pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine,dll)	Outcome :																	
			Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di DTPK	60%	38%	60%	5.041.013.367			40%	2.468.069.405			40%	2.468.069.405	40%		66,67%	48,96	Dinkes Provsu
			Output:																	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang dilakukan			2														
						Layanan														
		Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Outcome :																	Dinkes Provsu
			Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPT, RS Kusta Lausimomo	90%	92,20%	90%	111.125.161													
			Output:																	
			Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan			3														
						Unit														
		Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Bahan Habis Pakai Lainnya)	Outcome :																	
			Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPT, RS Kusta Lausimomo	90%	92,20%	90%	33.132.750	-					-		-					Dinkes Provsu
			Output:																	
			Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT, RS Khusus Mata	95%		95%			-				-		-					
			Output:																	
			Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Bahan Habis Pakai Lainnya) yang disediakan			2														
						Paket														
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Outcome :																	
			Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sesuai standar di UPT, Laboratorium Kesehatan	84,5%	85%	84,5%	8.748.454.447				129.287.250				129.287.250			0,00%	1,48	Dinkes Provsu
			Output:																	
			Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT, RS Khusus Paru	95%	98,95%	95%												0,00%		
			Output:																	
			Jumlah Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang disediakan dan dipelihara			191														
						Unit														
		Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Outcome :																	
			Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT, RS Khusus Paru	95%	98,95%	95%	131.121.000				21.972.450				21.972.450			0,00%	16,76	
			Output:																	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			1														
						Unit														
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Outcome :																	
			Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	96%	95,16%	96%	136.800.700			87,84%				87,84%	87,84%		91,50%	0,00	Dinkes Provsu	
			Output:																	

[illegible]

			Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	<49	55,4	<49	0,6	14,20%					14,20%		14,20%		100%		
			Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk (API)	0,09	0,28	0,09	0,02	0,06					0,06		0,06		67%		
			Angka Case Detection Rate Penyakit TB	90%	56,5%	76%	14,8%	12,70%					12,70%		12,70%		17%		
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate)	90%	90,2%	90%	91%	90,00%					90,00%		90,00%		100%		
			Prevalensi HIV/AIDS	<0,5%	0,26%	<0,5%	<0,5%	64,30%					64,30%		64,30%		100%		
			Angka Zoonosis Lainnya (Flu Burung, Rabies, Antraks, Leptospirosis) Ditangani sesuai Standar	85%	85,0%	80%	0,0%	77,00%					77,00%		77,00%		96%		
			Cakupan penemuan dan tata laksana kasus pneumonia pada balita	60%	68%	55%	10%	77,00%					77,00%		77,00%		140%		
			Angka Penemuan Kasus Baru Frambusia per 100.000 Penduduk	<0,1	0	<0,1	0	0%					0%		0%		100%		
			Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk	<5%	1,01	<5%	0,57	0,52					0,52		0,52		100%		
			Angka Kecelakaan Tingkat 2 Kuata	<10%	18,0%	<10%	18%	4%					4%		4%		100%		
			Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	11,33%	100%		24,93%					24,93%		24,93%				
			Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	32,26%	100%		60,26%					60,26%		60,26%				
			Jumlah kabupaten/kota dengan paling kurang 40% Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	29	28	24		6					6		6				
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Paling Kurang 80% Puskesmas Melakukan Pelayanan Terpadu PTM sesuai Standar	K/K	K/K	K/K		K/K					K/K		K/K				
				25	25	20		6					6		6				
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Cakupan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Paling Kurang 80%	K/K	K/K	K/K		K/K					K/K		K/K				
				15	1	10													
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Paling Kurang 80% Puskesmas Melakukan Deteksi Dini Penyakit Kanker	K/K	K/K	K/K		27					27		27				
				29	24	23													
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Gangguan Indra ≥ 40% Populasi	K/K	K/K	K/K		5					5		5				
				10	1	5													
			Output:	K/K	K/K	K/K		K/K					K/K		K/K				
			Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1													
						Dokumen													
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Outcome :																
			Persentase Jemaah Haji yang Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	100%	100%	79.058.000	100%	17.309.000				100%	17.309.000	100%			Dinkes Provsu	
			Output:																
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			1													
						Dokumen													
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Outcome :																
			Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	50,15%	100%	387.546.340	60%	37.188.000				60%	37.188.000	60%			Dinkes Provsu	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza di 30% SMA/Seaterajat	27	22	27		22					22		22				
				K/K	K/K	K/K		k/k					k/k		k/k				
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki 30% Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa sesuai Standar	27	21	27		22					22		22				
				K/K	K/K	K/K		k/k					k/k		k/k				
			Output:																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			1													
						Dok													
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Outcome :																
			Persentase Penderita, Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan NAPZA yang Menjalani Program Rehabilitasi Medis	1,5%	1,65%	1,5%	206.808.000	1,65%					1,65%		1,65%			Dinkes Provsu	
			Output:																
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis			1													
						Dok													
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Outcome :																
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80,3%	84,92%	80,3%	216.726.727.864	85%	52.212.281.500	86,19%	54.916.862.100		86,19%	107.129.143.600	86,19%		107,33%	49,43	Dinkes Provsu

			Persentase kesembuhan pasien Kusta di UPT. RS Kusta Lausimomo	100%	82%	100%													
			Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPT. RS Kusta Lausimomo	85%	92,20%	85%													
			Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPT. RS Indrapura	95%		95%													
			Output:																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			4													
			Dokumen																
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Outcome :																
		Cakupan Pelaksanaan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Kab/ Kota	73%	57,57%	73%	3.398.572.065	2.664.380.000	60,6%	400.301.048		60,6%	3.064.681.048	60,6%		83,01%	90,18	Dinkes Provsu		
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat di RSUD sesuai Standar	100%	91,11%	100%			91,11%			91,11%		91,11%						
		Output:																	
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			19														
		PSC																	
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Outcome :																
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB Provinsi	100%	100%	100%	38.400.000											Dinkes Provsu		
		Output:																	
		Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang didistribusikan			1														
		Paket																	
		Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Outcome :	100%	100%	100%	161.098.000		26.172.898			26.172.898				16,25			
		Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana																	
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB Provinsi	100%	100%	100%														
		Output:																	
		Jumlah dokumen hasil upaya pengurangan risiko krisis kesehatan			1														
		Dok																	
		Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Outcome :																
		Persentase Fasayankes yang Memenuhi Standar Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	90%	70%	90%	439.485.600		75%	139.675.000		75%	139.675.000	75%		83,33%	31,78	Dinkes Provsu		
		Persentase RSUD yang Menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 Jam	100%	89,50%	100%			80,95%			80,95%		80,95%		80,95%				
		Persentase RSUD Menerapkan PPK-BLUD	100%	71,11%	100%			73,33%			73,33%		73,33%		73,33%				
		Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang melaksanakan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	89,47%	100%			89,47%			89,47%		89,47%		89,47%				
		Output:																	
		Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			1														
		Dokumen																	
3		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	100%	100%	726.888.698	12.000.000		153.684.570			165.684.570			0%	22,79	Dinkes Provsu		
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Outcome :																
		Persentase kabupaten/kota yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100%	100%	100%	361.164.000		100%	94.516.570			94.516.570				26,17	Dinkes Provsu		
		Output:																	
		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			1														
		Dokumen																	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Outcome :																
		Persentase kabupaten/kota yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100%	100%	100%	365.724.698	12.000.000	100%	59.168.000			71.168.000			0%	19,46	Dinkes Provsu		
		Output:																	
		Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1														
		Dokumen																	

4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					9	1.346.241.600		10.600.000		165.168.097					175.768.097			0%	13,06	Dinkes Provsu
							RS															
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Outcome :																			
			Persentase Rumah Sakit yang Menerapkan Standarisasi Klasifikasi sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	90%	78,20%	90%		265.253.000	79,43%		79,90%	65.962.000			79,90%	65.962.000	79,90%		88,78%	24,87	Dinkes Provsu	
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	90%	70%	90%					75%				75%		75%		83,33%			
			Output:																			
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan dilindaktanuji perizinannya			35																
							RS															
		Peningkatan Tata kelola Rumah Sakit	Outcome :																			
			Persentase Rumah Sakit yang Menerapkan Standarisasi Klasifikasi sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	90%	78,20%	90%		360.481.600	79%		79,90%	29.320.000			79,90%	29.320.000	79,90%		88,78%	8,13	Dinkes Provsu	
			Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	89,47%	100%					89,47%			89,47%		89,47%		89,47%				
			Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan per 100.000 Penduduk	1,6	1,6	1,6																
			Persentase RSUD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	78%	71,11%	78%					73,33%			73,33%		73,33%		94,01%				
			Output:																			
			Jumlah Rumah Sakit yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar			40																
						Unit																
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Outcome :																			
			Persentase FKTP yang terakreditasi	95%	90,73%	95%		720.507.000	90,73%	10.600.000	90,73%	69.886.097			90,73%	80.486.097	90,73%		95,51%	11,17	Dinkes Provsu	
			Persentase RS Pemerintah (Non BUMN/ TNI Polri)	95,3%	84,44%	95,3%			84,78%		84,78%			84,78%		84,78%		88,96%				
			Persentase Akreditasi Laboratorium Kesehatan di Kab/Kota	50%	10,9%	50%		10,87%	10,87%		10,87%			10,87%		10,87%		21,74%				
			Output:																			
			Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan			40																
						Unit																
		Rata-rata capaian kinerja (%)						298.630.168.107	16,95	58.991.257.752	62,26	75.071.737.235			62,26	134.062.994.987	62,26		62,26	44,89		
		Predikat kinerja																				
	III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						10.858.443.054	0	2.183.832.674	97,40	954.312.543			97,40	3.138.145.217	97,40		97,40	28,90		
	1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk dan UKP Provinsi					1	6.960.741.400		2.125.107.174		560.118.867		-		2.685.226.041			38,58	Dinkes Provsu		
			Dok																			
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Outcome :																			
			Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (Sembilan) jenis tenaga Kesehatan	50%	37,56%	50%		4.307.218.000		2.125.107.174	34%	258.678.867			34%	2.383.786.041	34%		68,84%	55,34	Dinkes Provsu	
			Persentase Rumah Sakit yang memiliki tenaga Kesehatan sesuai standar	55%	68,57%	55%					70,27%			70,27%		70,27%		127,76%				
			Output:																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			1																
						Dokumen																
		Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Outcome :																			
			Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (Sembilan) jenis tenaga Kesehatan	50%	37,56%	50%		2.653.523.400			34,42%	301.440.000			34,42%	301.440.000	34,42%		68,84%		Dinkes Provsu	
			Persentase Rumah Sakit yang memiliki tenaga Kesehatan sesuai standar	55%	68,57%	55%					70,27%			70,27%		70,27%		127,76%				
			Output:																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi			1																
						Dokumen																
	2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					335	3.897.701.654		58.725.500		394.193.676				452.919.176			11,62	Dinkes Provsu		
			Orang																			
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Outcome :																			
			Persentase Tenaga Kesehatan yang Dilatih pada Pelatihan Terakreditasi	3%	1,79%	3%		3.897.701.654	0,39%	58.725.500	1,79%	394.193.676			1,79%	452.919.176	1,79%		59,67%	11,62	Dinkes Provsu	
			Persentase Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	30%	25%	30%					32%				32%		32%		106,67%			
			Output:																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat			335																
						Orang																
		Rata-rata capaian kinerja (%)						10.858.443.054	3,25	2.183.832.674	84,94	954.312.543			84,94	3.138.145.217	84,94		84,94	28,90		



DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Jl. Prof. HM. Yamin SH No. 41 AA, Medan
email: dinkes@sumutprov.go.id